

**STRATEGI POLITIK PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
PERLINDUNGAN HARGA JUAL TANDAN BUAH SEGAR
(TBS) DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD FAJRI

NIM. 190801004

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2026 M/1447 H

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

STRATEGI POLITIK PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HARGA JUAL TANDAN BUAH SEGAR (TBS) DI KABUPATEN NAGAN RAYA

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Disusun Oleh:

MUHAMMAD FAJRI
190801004

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing 1

Ramzi Murziqin, M.A.

NIP. 198605132019031006

A R R A N I R Y

**STRATEGI POLITIK PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
PERLINDUNGAN HARGA JUAL TANDAN BUAH SEGAR (TBS)
DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir/Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar (S1) Dalam Ilmu Politik
Diajukan Oleh:

Muhammad Fajri
190801004

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 Juni 2026

Banda Aceh

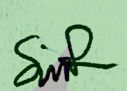
Panitia Munaqasyah Skripsi

Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir/Skripsi

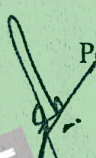
Ketua,


RAMZIMURZIQIN, M.A.
NIP. 198605132019031006

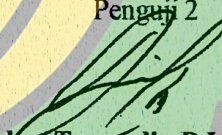
Sekretaris,


Syafiur Rahman S.A.P

Penguji 1


Aklima, M.A.
NIP. 198810062019032009

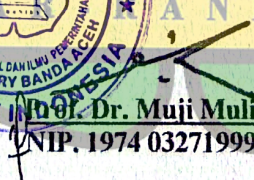
Penguji 2


Danil Akbar Taqwadin B.IAM., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198904082023211022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M. Ag
NIP. 1974 03271999031005

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Muhammad Fajri

Nim : 190801004

Tempat/Tanggal Lahir: Bondowoso, 21 Maret 2002

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Strategi Politik Pemerintahan Daerah Dalam Perlindungan Harga Jual Tandan Buah Segar (TBS) Di Kabupaten Nagan Raya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 18 Juni 2026

Yang menyatakan,

Muhammad Fajri

NIM. 190801004

ABSTRAK

Nama : Muhammad Fajri
NIM : 190801004
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Strategi Politik Pemerintahan Daerah Dalam Perlindungan Harga Jual Tandan Buah Segar (TBS) Di Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Halaman : 81 Halaman
Pembimbing : Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi politik Bupati Nagan Raya dalam mengintervensi stabilisasi harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, mengkaji posisi dan peran pemerintah daerah dalam memediasi konflik kepentingan antara Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan petani sawit, serta mengidentifikasi hambatan struktural dan faktor-faktor determinan yang memengaruhi efektivitas kebijakan stabilisasi harga TBS di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak pemerintah daerah (Dinas Perkebunan Nagan Raya), petani kelapa sawit, dan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menjaga stabilitas harga TBS dilakukan melalui pengawasan, koordinasi, penyampaian informasi, dan mediasi antara petani dengan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga TBS secara langsung karena harga dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan harga *Crude Palm Oil* (CPO). Pemerintah juga menjalankan fungsi mediasi dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara petani dan pihak PKS dengan menjembatani komunikasi dan mencari solusi atas perbedaan kepentingan yang muncul dalam penentuan harga TBS. Berdasarkan analisis teori strategi politik Schroder, strategi yang diterapkan pemerintah daerah cenderung menggunakan strategi defensif yang bertujuan mempertahankan stabilitas kondisi ekonomi masyarakat dan melindungi kepentingan petani dari dampak fluktuasi harga TBS. Faktor pendukung utama adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, petani, dan pihak PKS. Adapun faktor penghambat yang paling dominan adalah pengaruh mekanisme pasar global terhadap harga TBS, perbedaan kepentingan antara petani dan perusahaan, perubahan kondisi pasar yang berlangsung cepat, serta keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan harga secara langsung.

Kata Kunci: Strategi Politik, Pemerintah Daerah, Harga Tandan Buah Segar (TBS), Kelapa Sawit, Kabupaten Nagan Raya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Strategi Politik Pemerintahan Daerah Dalam Perlindungan Harga Jual Tandan Buah Segar (TBS) Di Kabupaten Nagan Raya**”. Adapun skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Politik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta motivasi yang tidak pernah putus kepada penulis.
2. Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan, serta bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Politik dan seluruh dosen Program Studi Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta bimbingan selama masa perkuliahan.
4. Seluruh informan penelitian, khususnya pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, petani kelapa sawit, dan pihak Pabrik Kelapa Sawit

(PKS) yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu kelancaran penelitian saya.

5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ilmu politik dan kebijakan publik, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 25 April 2026

Penulis

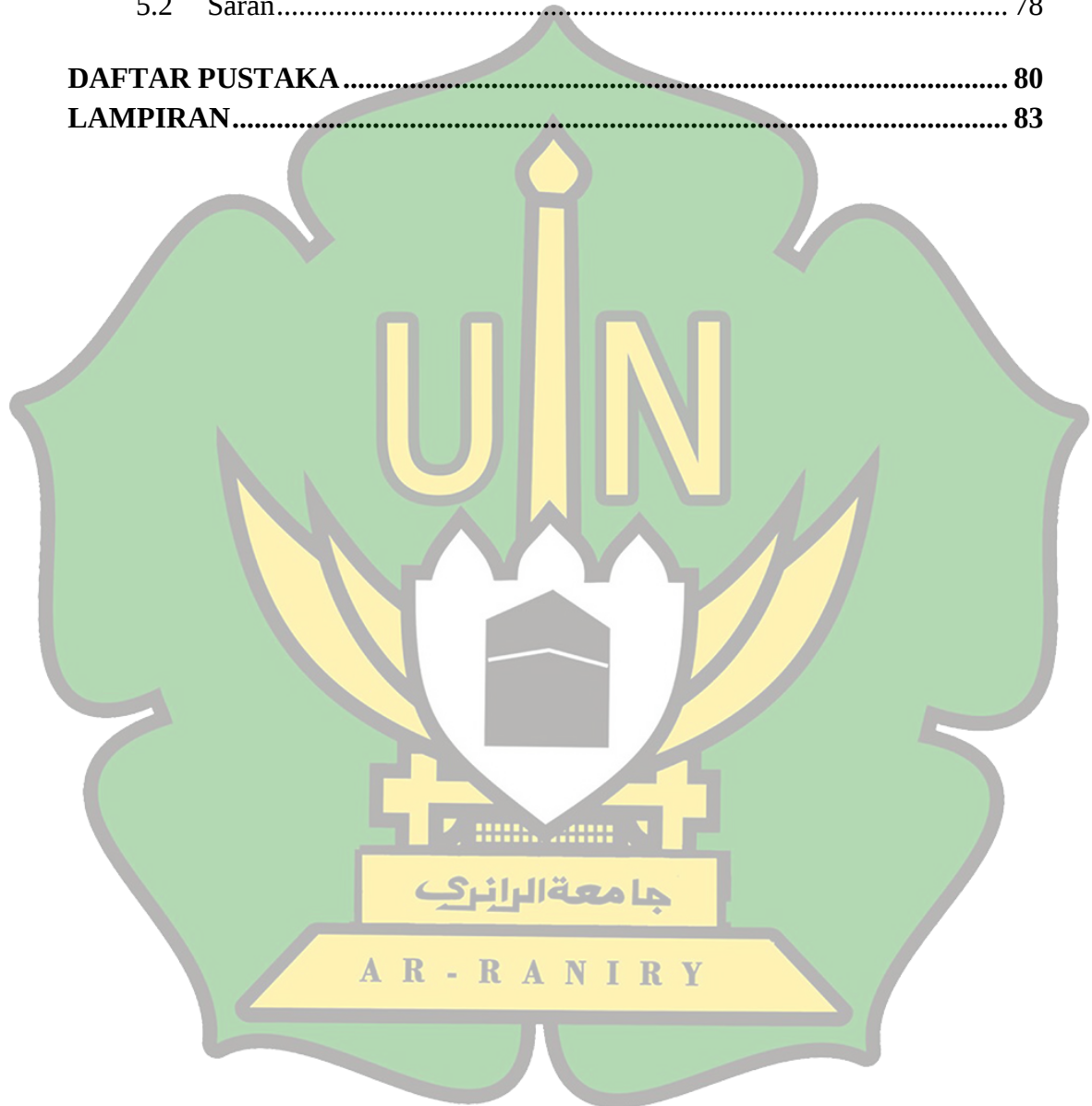
Muhammad Fajri



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.2 Landasan Konseptual	14
2.2.1 Teori Politik Pemerintahan.....	14
2.2.2 Teori Kebijakan Publik	16
2.2.3 Teori Strategi Politik.....	19
2.2.4 Teori Peran Pemerintah Sebagai Mediator.....	21
2.2.5 Konsep Harga dan Stabilisasi Harga TBS.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan Penelitian	27
3.2 Fokus Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	29
3.5 Informan Penelitian	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.2 Kondisi Ekonomi dan Potensi Perkebunan Kelapa Sawit.....	39
4.3 Hasil Penelitian	40
4.3.1 Strategi Politik Bupati Nagan Raya Dalam Intervensi.....	41
Stabilisasi Harga TBS	41
4.3.2 Posisi dan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Mediator	54
Konflik Antara PKS dan Petani	54
4.3.3 Hambatan Struktural dan Faktor Determinan Efektivitas	63
Kebijakan.....	63

4.4	Pembahasan.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		77
5.1	Kesimpulan.....	77
5.2	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		80
LAMPIRAN.....		83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lokasi Penelitian	38
Gambar 4.2 Kondisi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya.....	39
Gambar 4.3 Tumpukan Hasil Panen Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	40



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kriteria Informan Penelitian	31
Tabel 3.2 Paduan Pertanyaan Pemerintah Daerah	32
Tabel 3.3 Paduan Pertanyaan Petani Kelapa Sawit.....	32
Tabel 3.4 Paduan Pertanyaan Pihak Pabrik Kelapa	33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penting dalam perekonomian Indonesia. Peranannya tidak hanya sebagai sumber devisa negara, tetapi juga sebagai mata pencaharian utama bagi jutaan masyarakat, terutama petani di daerah.¹ Indonesia bahkan menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, sehingga sektor ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional maupun daerah. Produk turunan kelapa sawit seperti Crude Palm Oil (CPO) digunakan dalam berbagai industri, mulai dari makanan hingga energi, yang membuat permintaannya terus meningkat.²

Harga tandan buah segar (TBS) sebagai hasil utama petani sangat dipengaruhi oleh harga CPO di pasar. Ketika harga CPO naik, harga TBS cenderung ikut naik, dan sebaliknya. Kondisi ini menyebabkan harga TBS sering mengalami fluktuasi yang tidak menentu. Penelitian menunjukkan bahwa harga TBS dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti produksi, permintaan pasar, dan kondisi eksternal lainnya, sehingga sulit dikendalikan oleh petani.³

¹ Salsa Syakila Zahwa, RM. Rum Hendarmin, and Hamid Halin, "Penerapan Strategi Pengembangan Tergadap Komoditas Sawit Pada Masyarakat Desa Santan Sari Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin," *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 8, no. 11 (2025): 4200–4212.

² Mia Wananda Varwasih, Indah Kartika Sandra, and Julia Mardalisa M, "Transmisi Asimetris Harga Tandan Buah Segar (TBS) Domestik Dengan Harga Crude Palm Oil (CPO) Pasar Domestik," *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 11, no. 1 (2025): 1072–82.

³ Ferry Parotua Lubis, Mhd. Asaad, Tri Martial, and Yanti Mariana Eva, "Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Sumatera Utara," *Jurnal Muqoddimah: Urnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 9, no. 1 (2015).

Permasalahan lain muncul dari sistem tata niaga TBS yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Posisi petani cenderung lemah karena harus berhadapan dengan tengkulak dan perusahaan besar. Struktur pasar yang cenderung oligopoli membuat harga lebih banyak ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuatan modal.⁴ Akibatnya, petani sering menerima harga yang lebih rendah dibandingkan harga yang seharusnya.

Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar. Luas perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut mencapai sekitar 53 ribu hektar kebun sawit dengan total 11 pabrik komoditas minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) yang aktif beroperasi.⁵ Harga TBS di Kabupaten Nagan Raya masih sering mengalami naik turun. Pada tahun 2025, harga TBS berada di kisaran Rp2.600 per kilogram, sebagaimana tercatat dalam data Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya yang menunjukkan harga sekitar Rp2.620/kg di beberapa perusahaan. Perubahan harga juga terjadi secara berkala, di mana dalam satu periode harga dapat turun antara Rp20 hingga Rp60 per kilogram, serta berbeda antar pabrik pengolahan kelapa sawit.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa harga TBS tidak stabil dan sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar, termasuk harga CPO global.

⁴ Ella Putriana, Dewi Kurniati, and Erlinda Yurisinthae, "Struktur, Perilaku Dan Kinerja Pada Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit," *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal Of Indonesian Agribusiness* 11, no. 1 (2023): 75–86.

⁵ Arie Basuki, "Melihat Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Terbesar Di Provinsi Aceh," *Merdeka.com*, 2025, <https://www.merdeka.com/peristiwa/foto-melihat-perkebunan-kelapa-sawit-rakyat-terbesar-di-provinsi-aceh-419857-mvk.html>.

⁶ Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, "Harga TBS Sawit Nagan Raya Periode 21 April 2025: Mayoritas PMKS Catatkan Kenaikan Harga Pembelian," *Nagan Raya DisbunNews*, 2025, <https://disbun.naganrayakab.go.id/berita/kategori/berita-terkini/harga-tbs-sawit-nagan-raya-periode-21-april-2025-mayoritas-pmks-catatkan-kenaikan-harga-pembelian>.

Ketidakstabilan harga tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Petani sering berada pada posisi yang lemah dalam sistem tata niaga karena tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga.⁷ Di sisi lain, perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) memiliki akses informasi, modal, dan jaringan pasar yang lebih kuat. Kondisi ini memunculkan ketimpangan relasi kekuasaan antara petani dan perusahaan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam penentuan harga TBS.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa harga TBS bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan politik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang ekonomi dan sumber daya alam, termasuk dalam tata niaga komoditas perkebunan, penetapan kebijakan daerah, serta berperan sebagai fasilitator dan mediator antara masyarakat (petani) dengan pihak swasta atau perusahaan. Peran kepala daerah, khususnya Bupati, menjadi penting dalam menentukan arah kebijakan dan strategi intervensi yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga. Namun, intervensi pemerintah daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi struktur pasar, kepentingan beberapa pihak, maupun keterbatasan kebijakan yang ada.

Penelitian terdahulu oleh Sukowati yang berjudul *Pengaruh Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) terhadap Efek Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit di*

⁷ Ardiansyah Sinaga and Randa Putra Kasea Sinaga, "Dampak Ketidakstabilan Harga Kelapa Sawit Bagi Kesejahteraan Petani Di Desa Nagori Bayu Bagasan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun," *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 4, no. 1 (2025): 17–24, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4762>.

Indonesia menjelaskan bahwa fluktuasi harga TBS merupakan kondisi ketidakpastian (*uncertainty*) yang harus dihadapi oleh petani, sehingga berdampak langsung pada pendapatan dan kesejahteraan mereka. Fluktuasi harga tersebut terjadi secara terus-menerus dan sulit diprediksi, sehingga petani berada dalam posisi rentan terhadap risiko ekonomi.⁸

Penelitian lain menunjukkan bahwa harga TBS sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga CPO, produksi, dan kondisi lingkungan. Dalam penelitian Ferry Parotua Lubis yang berjudul *Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Sumatera Utara* menemukan bahwa dalam jangka panjang, harga TBS dipengaruhi oleh harga CPO dan produksi, sedangkan dalam jangka pendek fluktuasi tetap terjadi akibat dinamika pasar yang tidak stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani tidak memiliki kendali terhadap pembentukan harga yang mereka terima.⁹

Penelitian oleh Varwasih yang berjudul *Transmisi Asimetris Harga Tandan Buah Segar (TBS) Domestik dengan Harga Crude Palm Oil (CPO) Pasar Domestik* menjelaskan bahwa terdapat hubungan erat antara harga TBS dan harga CPO, di mana perubahan harga CPO akan memengaruhi harga TBS di tingkat petani. Namun, hubungan tersebut bersifat tidak simetris, artinya ketika harga CPO naik, harga TBS tidak selalu langsung ikut naik, sedangkan ketika harga CPO turun,

⁸ Nisa Nurjannah Sukowati, "Pengaruh Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Terhadap Efek Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia* 2, no. 3 (2022): 282–96, <https://doi.org/10.11594/jesi.02.03.05>.

⁹ Ferry Parotua Lubis, Mhd Asaad, Tri Martial, and Mariana Eva Yanti, "Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 9, no. 1 (2025): 533–38.

harga TBS cenderung lebih cepat menyesuaikan. Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam mekanisme pasar yang merugikan petani.¹⁰

Penelitian Sartika yang berjudul *Analisis Fluktuasi Harga Tanda Buah Segar (TBS) Dan Dampak Lingkungan Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Sawit: Studi Kasus Di Desa Setia Baru* menegaskan bahwa fluktuasi harga TBS memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan petani, bahkan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Kondisi lingkungan dan faktor produksi turut memperparah ketidakstabilan tersebut, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga.¹¹

Sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek ekonomi dan agribisnis. Kajian yang secara khusus membahas strategi politik kepala daerah, peran pemerintah daerah sebagai mediator konflik, serta hambatan struktural dalam implementasi kebijakan stabilisasi harga masih sangat terbatas, terutama pada konteks lokal seperti Kabupaten Nagan Raya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, yaitu kurangnya kajian yang melihat permasalahan harga TBS dari perspektif ilmu politik, khususnya terkait bagaimana strategi politik pemerintah daerah dalam mengintervensi pasar, bagaimana peran pemerintah dalam memediasi konflik antara petani dan PKS, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut.

¹⁰ Varwasih, Sandra, and M, "Transmisi Asimetris Harga Tandan Buah Segar (TBS) Domestik Dengan Harga Crude Palm Oil (CPO) Pasar Domestik."

¹¹ Yuni Sartika, Heffi Christya Rahayu, and Seprini, "Analisis Fluktuasi Harga Tanda Buah Segar (TBS) Dan Dampak Lingkungan Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Sawit: Studi Kasus Di Desa Setia Baru," *Variable: Research Journal* 02, no. 02 (2025): 534–45.

Permasalahan yang kompleks ini menegaskan bahwa tanpa adanya strategi politik yang tepat, stabilisasi harga TBS akan sulit tercapai dan petani akan terus berada dalam posisi yang dirugikan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami dinamika kebijakan dan peran pihak pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi politik Bupati Nagan Raya dalam mengintervensi stabilisasi harga TBS, mengkaji posisi dan peran pemerintah daerah dalam memediasi konflik kepentingan antara PKS dan petani, serta mengidentifikasi hambatan struktural dan faktor determinan yang memengaruhi efektivitas kebijakan stabilisasi harga tersebut.

Dengan demikian perlu dilakukan penelitian tentang **“Strategi Politik Pemerintahan Daerah dalam Perlindungan Harga Jual Tandan Buah Segar (TBS) di Kabupaten Nagan Raya”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih adil, efektif, dan berpihak kepada petani.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi politik Bupati Nagan Raya dalam mengintervensi stabilisasi harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit?
2. Bagaimana posisi dan peran pemerintah daerah dalam memediasi konflik kepentingan antara Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan petani sawit?
3. Apa saja hambatan struktural dan faktor determinan yang memengaruhi efektivitas kebijakan stabilisasi harga tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi politik Bupati Nagan Raya dalam mengintervensi stabilisasi harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
2. Untuk mengkaji posisi dan peran pemerintah daerah dalam memediasi konflik kepentingan antara Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan petani sawit.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan struktural serta faktor-faktor determinan yang memengaruhi efektivitas kebijakan stabilisasi harga TBS di Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini tidak hanya berupaya memperkaya kajian ilmiah dalam bidang ilmu politik, khususnya terkait strategi politik pemerintah daerah dalam kebijakan publik, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, petani, dan pihak perusahaan. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu politik, khususnya kajian mengenai politik lokal dan kebijakan publik di sektor perkebunan.

2. Menambah referensi akademik terkait strategi politik pemerintah daerah dalam mengintervensi mekanisme pasar komoditas.
3. Memperkaya kajian tentang relasi kekuasaan antara pemerintah daerah, perusahaan (PKS), dan petani dalam perspektif ilmu politik.
4. Menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu stabilisasi harga komoditas dan perlindungan petani.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak kepada petani sawit.
2. Bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran pemerintah dalam melindungi harga TBS.
3. Bagi perusahaan (PKS), penelitian ini dapat menjadi masukan dalam membangun hubungan yang lebih adil dan seimbang dengan petani.
4. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam memahami dinamika kebijakan harga komoditas perkebunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nisa Nurjannah Sukowati berjudul *“Pengaruh Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) terhadap Efek Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit di Indonesia”* bertujuan untuk menganalisis dampak fluktuasi harga TBS terhadap tingkat kesejahteraan petani kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis hubungan antara perubahan harga TBS dan pendapatan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga TBS memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani. Ketidakstabilan harga menciptakan kondisi ketidakpastian (*uncertainty*) yang berdampak langsung pada pendapatan petani. Ketika harga TBS mengalami penurunan, pendapatan petani juga menurun, sehingga memengaruhi kemampuan ekonomi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, kenaikan harga TBS dapat meningkatkan kesejahteraan petani, meskipun sifatnya tidak stabil dan sulit diprediksi. Penelitian ini menekankan bahwa petani berada pada posisi rentan karena tidak memiliki kontrol terhadap mekanisme pembentukan harga. Sehingga, diperlukan kebijakan yang mampu melindungi petani dari dampak fluktuasi harga

tersebut. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek ekonomi dan belum mengkaji secara mendalam peran politik pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Parotua Lubis berjudul “*Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Sumatera Utara*” bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi harga TBS kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data time series untuk melihat hubungan antara harga TBS dengan faktor-faktor seperti harga Crude Palm Oil (CPO), produksi, dan kondisi pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, harga TBS sangat dipengaruhi oleh harga CPO dan tingkat produksi. Sementara itu, dalam jangka pendek, fluktuasi harga tetap terjadi akibat dinamika pasar yang tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa harga TBS sangat bergantung pada faktor eksternal yang berada di luar kendali petani. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa mekanisme pasar memiliki peran dominan dalam menentukan harga TBS. Penelitian ini belum menyoroti bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengintervensi pasar atau merumuskan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, sehingga aspek politik dalam pengelolaan harga TBS masih belum tergambar secara jelas.¹³

¹² Sukowati, “Pengaruh Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Terhadap Efek Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Indonesia.”

¹³ Lubis, Asaad, Martial, and Yanti, “Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Sumatera Utara.”

Penelitian yang dilakukan oleh Mia Wananda Varwasih berjudul “*Transmisi Asimetris Harga Tandan Buah Segar (TBS) Domestik dengan Harga Crude Palm Oil (CPO) Pasar Domestik*” bertujuan untuk menganalisis hubungan antara harga TBS di tingkat petani dengan harga CPO di pasar domestik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model analisis transmisi harga untuk melihat bagaimana perubahan harga CPO memengaruhi harga TBS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara harga TBS dan harga CPO, hubungan tersebut bersifat asimetris. Ketika harga CPO meningkat, harga TBS tidak selalu langsung mengalami kenaikan secara proporsional. Sebaliknya, ketika harga CPO menurun, harga TBS cenderung lebih cepat menyesuaikan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam mekanisme pasar yang cenderung merugikan petani. Penelitian ini menegaskan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi keuntungan dalam rantai nilai kelapa sawit. Penelitian ini belum mengkaji peran pemerintah sebagai pihak yang dapat mengoreksi ketimpangan tersebut melalui kebijakan atau strategi politik tertentu.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Sartika berjudul “*Analisis Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) dan Dampak Lingkungan yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Sawit: Studi Kasus di Desa Setia Baru*” bertujuan untuk menganalisis pengaruh fluktuasi harga TBS dan faktor lingkungan terhadap pendapatan petani kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi kasus pada tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan

¹⁴ Varwasih, Sandra, and M, “Transmisi Asimetris Harga Tandan Buah Segar (TBS) Domestik Dengan Harga Crude Palm Oil (CPO) Pasar Domestik.”

bahwa fluktuasi harga TBS memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan petani. Faktor lingkungan seperti kondisi lahan, cuaca, dan produktivitas tanaman juga turut memengaruhi hasil produksi dan pendapatan petani. Kesejahteraan petani tidak hanya dipengaruhi oleh harga pasar, tetapi juga oleh faktor internal dan eksternal lainnya. Penelitian ini menekankan pentingnya stabilisasi harga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, penelitian ini belum membahas bagaimana strategi kebijakan atau peran politik pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut.¹⁵

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukowati, Ferry Parotua Lubis, Varwasih, dan Sartika. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal tema yang dibahas, yaitu mengenai harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Seluruh penelitian sama-sama menyoroti permasalahan fluktuasi harga TBS yang tidak stabil serta dampaknya terhadap petani. Selain itu, penelitian terdahulu dan penelitian ini juga sama-sama melihat bahwa harga TBS dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga Crude Palm Oil (CPO), produksi, serta kondisi pasar. Dampak dari ketidakstabilan harga tersebut juga menjadi perhatian bersama, terutama terhadap kesejahteraan dan pendapatan petani sawit. Meskipun memiliki kesamaan tema, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan penelitian terdahulu. Perbedaan utama terletak pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan.

¹⁵ Sartika, Rahayu, and Seprini, "Analisis Fluktuasi Harga Tanda Buah Segar (TBS) Dan Dampak Lingkungan Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Sawit: Studi Kasus Di Desa Setia Baru."

Penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan ekonomi dan lebih banyak membahas hubungan antara harga, produksi, dan pendapatan petani secara kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu politik. Fokus penelitian ini bukan hanya pada harga, tetapi lebih kepada bagaimana pemerintah daerah, khususnya Bupati, menyusun dan menjalankan strategi untuk menjaga stabilitas harga TBS. Selain itu, penelitian ini juga melihat peran pemerintah daerah dalam menjadi penengah antara petani dan perusahaan (PKS), serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Perbedaan lainnya terletak pada fokus kajian masing-masing penelitian terdahulu. Penelitian Sukowati lebih menekankan pada dampak fluktuasi harga terhadap kesejahteraan petani. Penelitian Ferry Parotua Lubis berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi harga TBS. Penelitian Varwasih mengkaji hubungan antara harga TBS dan harga CPO yang bersifat tidak seimbang. Sementara itu, penelitian Sartika lebih melihat pengaruh harga dan faktor lingkungan terhadap pendapatan petani. Adapun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada strategi politik pemerintah daerah dalam melindungi harga TBS, termasuk peran sebagai mediator konflik dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Penelitian ini juga lebih spesifik dilakukan di Kabupaten Nagan Raya, sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi lokal.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1. Teori Politik Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) berdasarkan asas otonomi daerah. Melalui asas tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Kewenangan pemerintah daerah merupakan hak, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah pusat melalui prinsip otonomi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pelayanan publik di daerah. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga memiliki ruang untuk mengambil kebijakan strategis sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Secara umum, kewenangan pemerintah daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu:¹⁷

¹⁶ Fikri Hadi, Farina Gandryani, and Fatma Afifah, "Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3, no. 4 (2015): 83–98.

¹⁷ Agnes Xena Phalosa Magdalena and Aryo Fadlian, "Masyarakat Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah," *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021): 71–89.

1. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat.
2. Urusan pemerintah pilihan merupakan kewenangan yang disesuaikan dengan potensi unggulan daerah, seperti sektor pariwisata, pertanian, kelautan, atau industri lokal, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan potensi daerah, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pemberian perizinan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Peran kepala daerah (bupati) tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi strategis yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai keputusan strategis melalui kebijakan yang bersifat administratif maupun politis, sehingga posisi bupati menjadi pihak utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Bupati memegang peranan sentral dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan, khususnya dalam upaya meningkatkan

¹⁸ Magdalena and Fadlian.

kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk nyata peran tersebut adalah dalam penanggulangan kemiskinan, di mana kepala daerah dituntut mampu menciptakan kebijakan yang tepat sasaran serta inovatif agar dapat menurunkan angka kemiskinan di daerahnya.¹⁹

Peran kepala daerah juga tercermin dari kemampuan dalam menyusun visi yang jelas serta menunjukkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan program pembangunan. Visi dan komitmen tersebut menjadi dasar dalam merancang serta mengimplementasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan.

2.2.2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu pernyataan atau dokumen tertulis yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam menentukan batasan serta arah umum dalam menetapkan ruang lingkup tertentu. Secara etimologis, istilah “kebijakan” dapat dimaknai sebagai rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kerja, kepemimpinan, serta cara bertindak. Istilah kebijakan sendiri berasal dari kata “policy”. Kebijakan dapat dipahami sebagai instrumen kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam konteks *governance* yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik, maupun dalam konteks *government* yang berhubungan dengan aparatur negara.²⁰

¹⁹ Mulyati Kartini, “Peran Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus Di Kabupaten B,” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 8 (2025): 3426–34.

²⁰ Putri Ayu Anisya, “Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH)* 3, no. 1 (2024): 94–100.

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program yang disusun secara terarah untuk mencapai tujuan tertentu, sekaligus mencerminkan nilai-nilai dan praktik yang dijalankan. Sementara itu, Carl J. Friedrich memandang kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu kondisi tertentu, dengan mempertimbangkan berbagai hambatan dan peluang yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun James E. Anderson menjelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan jelas dan dilaksanakan oleh individu maupun kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.²¹

Kebijakan merupakan keputusan atau tindakan yang secara langsung mengatur bagaimana sumber daya alam, keuangan, dan manusia dikelola serta didistribusikan untuk kepentingan masyarakat luas, seperti individu, kelompok, maupun warga negara. Dalam proses pembentukannya, kebijakan dipengaruhi oleh berbagai gagasan, ideologi, teori, serta kepentingan yang saling berinteraksi baik melalui kerja sama, kompromi, maupun persaingan dalam sistem pemerintahan.²² Proses kebijakan publik terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:²³

1. Formulasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap awal dalam proses kebijakan publik, yaitu proses merumuskan atau menyusun kebijakan untuk menyelesaikan suatu

²¹ Taufiqurokhman, "Teori Dan Konsep Dasar Kebijakan Publik" (Jakarta, 2023).

²² Anisya, "Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik."

²³ Budi Hartono and Hadi Jauhari, *Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kebijakan Publik* (Palembang: CV IRDH, 2020).

masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam tahap ini, keputusan-keputusan kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata melalui program, kegiatan, dan aktivitas operasional oleh lembaga atau birokrasi. Implementasi melibatkan berbagai unsur seperti pihak pelaksana, organisasi, sumber daya, prosedur, serta koordinasi antar lembaga. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mencapai hasil atau dampak yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam tahap ini, keputusan-keputusan kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata melalui program, kegiatan, dan aktivitas operasional oleh lembaga atau birokrasi. Implementasi melibatkan berbagai unsur seperti pihak pelaksana, organisasi, sumber daya, prosedur, serta koordinasi antar lembaga. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mencapai hasil atau dampak yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahap penilaian terhadap hasil dan dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan standar atau kriteria tertentu, serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Kebijakan di sektor perkebunan, khususnya kebijakan moratorium izin baru, merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat ekspansi perkebunan yang tidak terkendali, terutama pada komoditas kelapa sawit. Kebijakan ini diterapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 yang bertujuan untuk menunda pemberian izin baru serta melakukan evaluasi terhadap izin yang telah ada. Tujuan utamanya adalah memperbaiki tata kelola lahan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta meningkatkan produktivitas tanpa harus membuka lahan baru. Kebijakan ini juga muncul sebagai respon terhadap dampak negatif dari perluasan perkebunan, seperti deforestasi, degradasi lahan gambut, serta penurunan fungsi ekologis lingkungan. Ekspansi perkebunan yang pesat telah menyebabkan perubahan penggunaan lahan secara signifikan, termasuk berkurangnya hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon dan pengatur ekosistem. Efektivitas kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu kejelasan regulasi, tingkat sosialisasi kebijakan kepada daerah, dukungan dari lembaga lokal, mekanisme pengawasan dan evaluasi, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku.²⁴

2.2.3. Teori Strategi Politik

Strategi politik merupakan cara atau pendekatan yang digunakan oleh para pemimpin politik untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik yang ingin dicapai. Dalam buku *The Handbook of Political Marketing*, Bruce I. Newman dan John Philip Jones menjelaskan bahwa strategi politik adalah serangkaian tindakan serta

²⁴ Usman Bahri et al., "Dampak Kebijakan Moratorium Pemberian Izin Baru Di Sektor Perkebunan Terhadap Tata Kelola Lahan Di Provinsi Riau," *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)* 11, no. 2 (2025): 643–53.

kebijakan yang dipilih oleh pihak politik guna mencapai sasaran politiknya, termasuk dalam mengelola citra diri, memperoleh dukungan masyarakat, dan memenangkan pemilihan umum. Menurut Schroder, terdapat dua jenis strategi politik yaitu:²⁵

1. Strategi ofensif, yaitu strategi yang menekankan pada upaya menyerang lawan politik secara langsung. Dalam pendekatan ini, pihak politik berusaha memperkuat posisi mereka sekaligus memanfaatkan kelemahan lawan untuk memperoleh keuntungan. Strategi ofensif biasanya digunakan ketika pihak politik ingin memengaruhi opini publik atau bahkan menggantikan kepemimpinan yang sedang berkuasa.
2. Strategi defensif, yaitu strategi yang berfokus pada upaya melindungi diri dari serangan lawan politik. Dalam hal ini, pihak politik berusaha mempertahankan posisi yang telah dimiliki serta mencegah kelemahan mereka dimanfaatkan oleh pihak lawan. Strategi defensif umumnya diterapkan ketika pihak politik ingin menjaga dukungan masyarakat atau mempertahankan kondisi yang sudah ada (status quo).

Strategi politik merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis, bersifat strategis sekaligus taktis, serta mencakup dimensi jangka panjang dan jangka pendek, yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada pemilih. Tujuan utamanya adalah membentuk dan mempengaruhi

²⁵ Samsir Hamajen, Asep Setiawan, and Lusi Andriyani, "Strategi Politik Pemenangan Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba Di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan 2020," *Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 4, no. 1 (2023): 7–20, <https://doi.org/10.24853/independen.4.1.7->.

harapan, sikap, keyakinan, orientasi, serta perilaku pemilih. Perilaku yang diharapkan dari pemilih tersebut adalah adanya dukungan dalam berbagai bentuk, terutama dalam menentukan pilihan kepada partai atau kandidat tertentu.²⁶

Bentuk strategi politik dalam kebijakan dapat diartikan sebagai berbagai upaya yang dilakukan oleh para pelaku kebijakan untuk memengaruhi jalannya proses serta hasil kebijakan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peran para pelaku, penerapan model kebijakan, tahapan proses kebijakan, pengelolaan konteks, serta pemanfaatan sumber daya kekuasaan yang dimiliki. Kebijakan publik tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga merupakan hasil dari dinamika dan strategi politik yang kompleks.²⁷

2.2.4. Teori Peran Pemerintah Sebagai Mediator

Pemerintah sebagai regulator memiliki peran utama dalam menetapkan dan menyusun berbagai peraturan serta kebijakan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan. Melalui fungsi ini, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pihak yang mengarahkan jalannya pembangunan agar tetap seimbang, teratur, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peran regulator juga mencakup penyediaan acuan dasar atau mekanisme yang jelas bagi masyarakat. Aturan dan kebijakan yang dibuat berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur berbagai kegiatan,

²⁶ Suaib Napir, "Strategi Pemenangan Fahmi Massiara-Lukman Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Majene," *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddi* 2, no. 2 (2016): 147–59.

²⁷ Rusdiyanta, Rudi Subiyakto, and Bambang Pujiyono, *Kebijakan Publik Aktor, Model Dan Proses* (Yogyakarta: CV. Graha Ilmu dengan, 2022).

khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah. Pemerintah sebagai regulator juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Regulasi yang disusun bertujuan untuk menciptakan keteraturan, mengurangi hambatan, serta mendorong terciptanya inovasi dalam berbagai sektor²⁸

Pemerintah sebagai fasilitator memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif, penghubung atau penengah berbagai kepentingan masyarakat. Pemerintah turut membantu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan, pengembangan usaha, serta peningkatan keterampilan, sehingga masyarakat mampu berpartisipasi aktif. Pemerintah sebagai fasilitator juga berfungsi untuk mendorong dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini dilakukan dengan memberikan dukungan, arahan, dan kesempatan kepada masyarakat untuk berinisiatif serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.²⁹

Pemerintah sebagai mediator konflik memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. Mediasi dipandang sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih efektif dibandingkan jalur litigasi, karena mampu menghadirkan solusi yang damai, cepat, dan menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Peran pemerintah sebagai

²⁸ Gayos Alfajri, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Di Desa Sungai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 6, no. 1 (2024): 94–102, <https://doi.org/10.31289/jipikom.v6i1.3824>.

²⁹ Miftahul Haerat, Muhammad Isa Ansari, and Fatmawati, "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Tanama Porang Di Kabupaten Sinjai," *Journal of Public Policy and Management* 4, no. 1 (2022): 21–27.

mediator terlihat dari keterlibatannya dalam menghadirkan ruang dialog antara pihak-pihak yang berkonflik. Pemerintah berfungsi sebagai pihak yang netral untuk mempertemukan kepentingan yang berbeda, sehingga tercapai kesepakatan bersama tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Proses mediasi di Indonesia, faktor politik juga sering mempengaruhi jalannya penyelesaian konflik. Pemerintah, bersama lembaga lain seperti lembaga peradilan, menjadi bagian dari dinamika tersebut. Intervensi politik dapat memperkuat proses mediasi apabila digunakan secara tepat, namun juga dapat menjadi hambatan apabila tidak dikelola dengan baik. Mediasi memungkinkan terciptanya kesepakatan yang lebih diterima oleh semua pihak karena prosesnya melibatkan komunikasi, negosiasi, dan kompromi.³⁰

2.2.5. Konsep Harga Dan Stabilisasi Harga

Harga TBS merupakan nilai yang diperoleh petani saat menjual hasil panen kelapa sawitnya kepada perusahaan maupun tengkulak. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan umumnya mengacu pada ketentuan tim penetapan harga atau pemerintah, sedangkan harga yang ditawarkan oleh tengkulak ditentukan secara mandiri oleh pihak tengkulak itu sendiri. Pada umumnya, harga yang diberikan oleh tengkulak lebih rendah dibandingkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.³¹

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dipengaruhi oleh beberapa faktor

³⁰ Ismaidar, Tamaulina Br Sembiring, and Bonari Tua Silalahi, "Dinamika Politik Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Melalui Jalur Mediasi Di Indonesia," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 144–50.

³¹ Elisa Wildayana, "Pendekatan Pengendalian Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit," *Jurnal Habitat* 27, no. 3 (2016): 103–8, <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.3.12>.

utama, yaitu produksi TBS, harga Crude Palm Oil (CPO), dan curah hujan. Faktor-faktor ini memiliki pengaruh yang berbeda baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yaitu:³²

1. Produksi TBS merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi harga. Ketika produksi meningkat, jumlah pasokan di pasar juga bertambah, sehingga dapat menekan harga. Jika produksi menurun, maka harga cenderung naik karena keterbatasan pasokan. Dalam jangka pendek, faktor produksi menjadi satu-satunya faktor yang berpengaruh signifikan terhadap harga TBS.
2. Harga CPO (Crude Palm Oil) turut memengaruhi harga TBS karena TBS merupakan bahan baku utama dalam produksi minyak sawit. Jika harga CPO di pasar meningkat, maka harga TBS juga cenderung naik karena nilai ekonominya ikut meningkat. Penurunan harga CPO akan berdampak pada turunnya harga TBS di tingkat petani.
3. Curah hujan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi harga TBS, terutama dalam jangka panjang. Curah hujan yang tinggi dapat memengaruhi produktivitas tanaman serta proses panen dan distribusi. Kondisi cuaca yang tidak stabil dapat menyebabkan penurunan produksi atau gangguan distribusi, yang pada akhirnya berdampak pada fluktuasi harga.

Konsep stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) pada dasarnya berkaitan dengan upaya mengendalikan fluktuasi harga agar tidak mengalami perubahan yang

³² Lubis, Asaad, Martial, and Eva, "Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Sumatera Utara."

terlalu drastis. Stabilitas harga TBS dapat dipahami sebagai kondisi ketika perubahan harga berada dalam batas yang wajar dan terkendali, sehingga petani memiliki kepastian dalam memperoleh pendapatan. Ketika harga terlalu sering naik dan turun secara tajam, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi petani kelapa sawit. Salah satu strategi utama adalah penetapan kebijakan harga yang berlaku bagi seluruh petani, sehingga dapat mengurangi ketimpangan harga antara petani plasma dan petani swadaya.³³

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan, karena harga barang kebutuhan pokok sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan tingkat inflasi. Harga suatu komoditas sangat memengaruhi keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan maupun produksi. Ketika harga tinggi, petani cenderung memperoleh keuntungan yang besar. Sebaliknya, jika harga rendah, petani tidak hanya kehilangan keuntungan tetapi juga berpotensi mengalami kerugian karena tidak sebanding dengan biaya produksi dan kondisi pasar. Dalam mekanisme pasar, proses jual beli tidak hanya dipengaruhi oleh perspektif hukum atau ekonomi Islam, tetapi juga melibatkan peran pemerintah. Pemerintah, khususnya di tingkat daerah, kota, dan provinsi, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk melindungi petani, mengurangi ketidakpastian harga, serta memastikan harga di pasar tetap stabil.³⁴

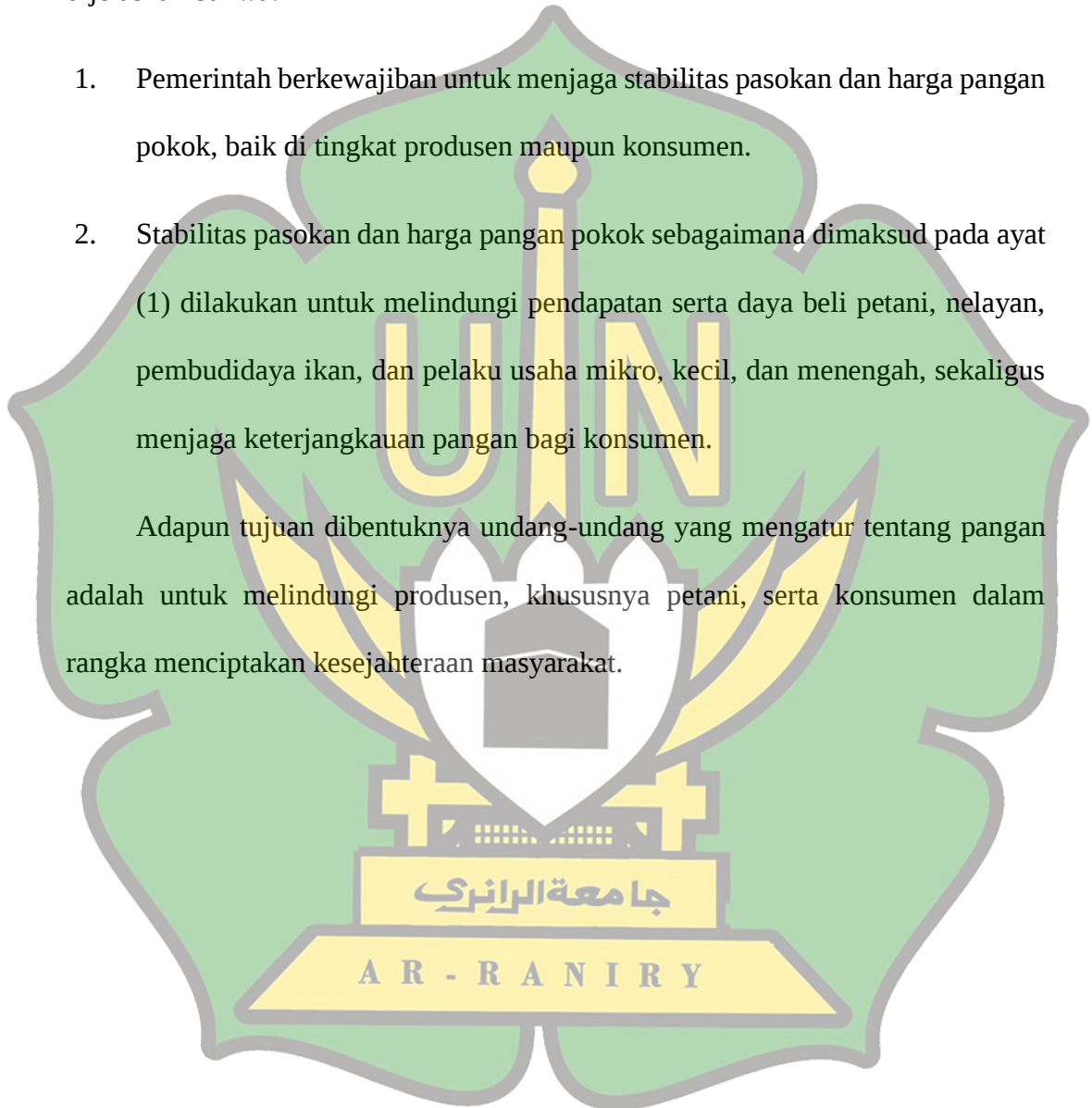
³³ Wildayana, "Pendekatan Pengendalian Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit."

³⁴ Febriansyah, "Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjaga Kestabilan Harga Pangan Yang Kian Meningkat," *AL-BAHST Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 35–43.

Adapun ketentuan yang mengatur hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pada Pasal 55 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa:

1. Pemerintah berkewajiban untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, baik di tingkat produsen maupun konsumen.
2. Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan serta daya beli petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus menjaga keterjangkauan pangan bagi konsumen.

Adapun tujuan dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang pangan adalah untuk melindungi produsen, khususnya petani, serta konsumen dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian. Pendekatan ini menekankan pada pemaknaan, proses, serta pemahaman terhadap realitas sosial yang kompleks. Penggunaan pendekatan kualitatif dinilai tepat karena penelitian ini mengkaji strategi politik pemerintah daerah dalam perlindungan harga Tandan Buah Segar (TBS), yang memerlukan analisis mendalam terhadap tindakan dan kebijakan pihak yang terlibat.³⁵

Penulis memilih pendekatan kualitatif karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran angka atau analisis statistik, melainkan berfokus pada pemahaman terhadap kebijakan, strategi politik, serta peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga TBS. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pemerintah daerah menjalankan perannya sebagai pengambil kebijakan sekaligus mediator antara petani dan perusahaan dalam menghadapi fluktuasi harga. Pendekatan kualitatif memberikan kemampuan untuk memahami makna serta konteks sosial dari suatu fenomena secara lebih mendalam.³⁶

³⁵ R Lubis and Murhayati, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Sosial," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025).

³⁶ N Taqiyya, "Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Fenomena Sosial.," *Jurnal Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2024).

Pendekatan kualitatif juga menekankan pada proses serta interaksi sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian ini tidak hanya melihat hasil akhir dari suatu kebijakan, tetapi juga mengkaji bagaimana proses perumusan, implementasi, serta hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga TBS. Data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan serta kondisi nyata di lapangan, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif.³⁷

Penelitian dilakukan dalam kondisi yang alami tanpa adanya manipulasi variabel. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami pengalaman, persepsi, serta tindakan para pihak yang terlibat dalam kebijakan harga TBS secara lebih mendalam. Fleksibilitas dalam pendekatan kualitatif juga memberikan ruang bagi penulis untuk menyesuaikan proses penelitian dengan dinamika yang terjadi di lapangan, sehingga hasil penelitian lebih kontekstual dan relevan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi politik pemerintah daerah dalam perlindungan harga Tandan Buah Segar (TBS) di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana Bupati sebagai kepala daerah merumuskan dan menjalankan strategi dalam mengintervensi stabilitas harga TBS. Fokus penelitian juga diarahkan pada peran pemerintah daerah sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara petani kelapa sawit dan pihak

³⁷ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.

Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Penelitian ini melihat bagaimana pemerintah daerah menjembatani kepentingan kedua pihak agar tercipta keseimbangan dalam penentuan harga. Fokus lainnya adalah mengidentifikasi hambatan struktural serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga TBS di Kabupaten Nagan Raya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit yang cukup besar, serta memiliki permasalahan terkait fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) yang berdampak pada kesejahteraan petani. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji strategi politik pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga TBS. Selain itu, di wilayah ini terdapat interaksi antara pemerintah daerah, petani, dan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS), sehingga dapat memberikan data yang relevan dengan tujuan penelitian.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, informasi, serta penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Data ini digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai strategi politik pemerintah daerah dalam perlindungan harga Tandan Buah Segar (TBS), serta

peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Data kualitatif lebih menekankan pada makna dan proses dibandingkan dengan angka.³⁸

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi di lapangan. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak pemerintah daerah, petani kelapa sawit, serta pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terlibat dalam proses penentuan harga TBS. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi yang aktual dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.³⁹

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta laporan yang berkaitan dengan harga TBS dan kebijakan pemerintah daerah. Data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer serta memberikan landasan teori yang relevan dengan penelitian. Penggunaan data sekunder membantu penulis dalam memahami konteks serta mendukung analisis yang dilakukan.⁴⁰

3.5 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut mengetahui dan terlibat langsung dalam permasalahan harga Tandan Buah Segar (TBS) di Kabupaten Nagan Raya atau berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan

³⁸ Waruwu.

³⁹ Taqiyya, "Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Fenomena Sosial."

⁴⁰ Lubis and Murhayati, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Sosial."

disesuaikan dengan kebutuhan data di lapangan. Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Kriteria Informan Penelitian

No	Informan	Kriteria Informan	Jumlah
1	Pemerintah Daerah	Pihak yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait harga TBS (Dinas Perkebunan Nagan Raya /instansi terkait)	2 orang
2	Petani Kelapa Sawit	Petani yang mengalami langsung fluktuasi harga TBS dan menjual hasil panennya	3 orang
3	Pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS)	Pihak yang terlibat dalam proses pembelian dan penentuan harga TBS	2 orang
Jumlah Informan			7 orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi politik pemerintah daerah dalam perlindungan harga Tandan Buah Segar (TBS) di Kabupaten Nagan Raya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang telah ditentukan, yaitu pihak pemerintah daerah, petani kelapa sawit, dan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai strategi politik pemerintah daerah, peran sebagai mediator, serta hambatan dalam menjaga stabilitas harga TBS. Melalui wawancara, penulis dapat memperoleh data secara langsung dari sumber yang terlibat dalam permasalahan penelitian.⁴¹

Tab 3.2. Panduan Pertanyaan Pemerintah Daerah

No	Pertanyaan
1	Bagaimana kondisi harga TBS di Kabupaten Nagan Raya saat ini?
2	Apa saja strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga TBS?
3	Apakah ada kebijakan khusus yang dibuat pemerintah terkait harga TBS?
4	Bagaimana peran pemerintah sebagai penengah antara petani dan pihak PKS?
5	Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga TBS?

Tab 3.3. Panduan Pertanyaan Petani Kelapa Sawit

No	Pertanyaan
1	Bagaimana kondisi harga TBS yang bapak/ibu rasakan saat ini?

⁴¹ Taqiyya, "Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Fenomena Sosial."

2	Apakah harga TBS sering mengalami perubahan? Bagaimana dampaknya bagi bapak/ibu?
3	Apakah harga yang diterima sudah sesuai atau masih merugikan?
4	Apakah pemerintah pernah berperan dalam membantu masalah harga TBS?
5	Apa harapan bapak/ibu terhadap pemerintah terkait harga TBS ke depan?

Tab 3.4. Panduan Pertanyaan Pihak Pabrik Kelapa (PKS)

No	Pertanyaan
1	Bagaimana proses penentuan harga TBS di perusahaan ini?
2	Faktor apa saja yang memengaruhi harga TBS?
3	Apakah perusahaan mengikuti kebijakan harga dari pemerintah daerah?
4	Bagaimana hubungan perusahaan dengan petani dalam proses pembelian TBS?
5	Bagaimana pandangan perusahaan terhadap peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga TBS?

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi di lapangan yang berkaitan dengan proses jual beli TBS, interaksi antara petani dengan pihak PKS, serta peran pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan harga. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai situasi yang terjadi, sehingga data yang diperoleh tidak hanya

berdasarkan hasil wawancara, tetapi juga berdasarkan kondisi faktual di lapangan.⁴²

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen resmi pemerintah, laporan, arsip, serta data terkait harga TBS. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Data dokumentasi juga membantu penulis dalam memahami konteks serta mendukung analisis penelitian.⁴³

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengolah dan memahami data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi politik pemerintah daerah dalam perlindungan harga Tandan Buah Segar (TBS) di Kabupaten Nagan Raya.⁴⁴ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

⁴² Lubis and Murhayati, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Sosial."

⁴³ A Nurrisa, "Karakteristik Penelitian Kualitatif Dalam Kajian Sosial," *Karakteristik Penelitian Kualitatif Dalam Kajian Sosial* 3, no. 1 (2025).

⁴⁴ Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan."

1. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memahami data yang telah diperoleh di lapangan.⁴⁵
2. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami. Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian, seperti strategi politik pemerintah daerah, peran sebagai mediator, serta hambatan dalam menjaga stabilitas harga TBS. Penyajian data ini bertujuan agar penulis dapat melihat gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian.⁴⁶
3. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasikan data yang telah disajikan sehingga diperoleh makna dan temuan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data baru yang lebih kuat. Proses analisis dilakukan secara berulang hingga diperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

⁴⁵ Taqiyya, "Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Fenomena Sosial."

⁴⁶ Lubis and Murhayati, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Sosial."

⁴⁷ Nurrisa, "Karakteristik Penelitian Kualitatif Dalam Kajian Sosial."

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu daerah yang memiliki sektor perkebunan kelapa sawit yang berkembang dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Kabupaten Nagan Raya juga menjadi salah satu wilayah yang mengalami dinamika harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani serta hubungan antara petani, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan pengolahan kelapa sawit. Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah pantai barat selatan Provinsi Aceh.

Kabupaten ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Secara geografis Kabupaten Nagan Raya berada pada posisi strategis karena memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama pada sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Wilayah ini memiliki kondisi topografi yang beragam mulai dari dataran rendah hingga wilayah berbukit yang mendukung pengembangan komoditas perkebunan.⁴⁸

⁴⁸ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, "Gambaran Umum Kabupaten," Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2026, <https://www.naganrayakab.go.id/halaman/gambaran-umum-kabupaten>.

Adapun batas wilayah Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

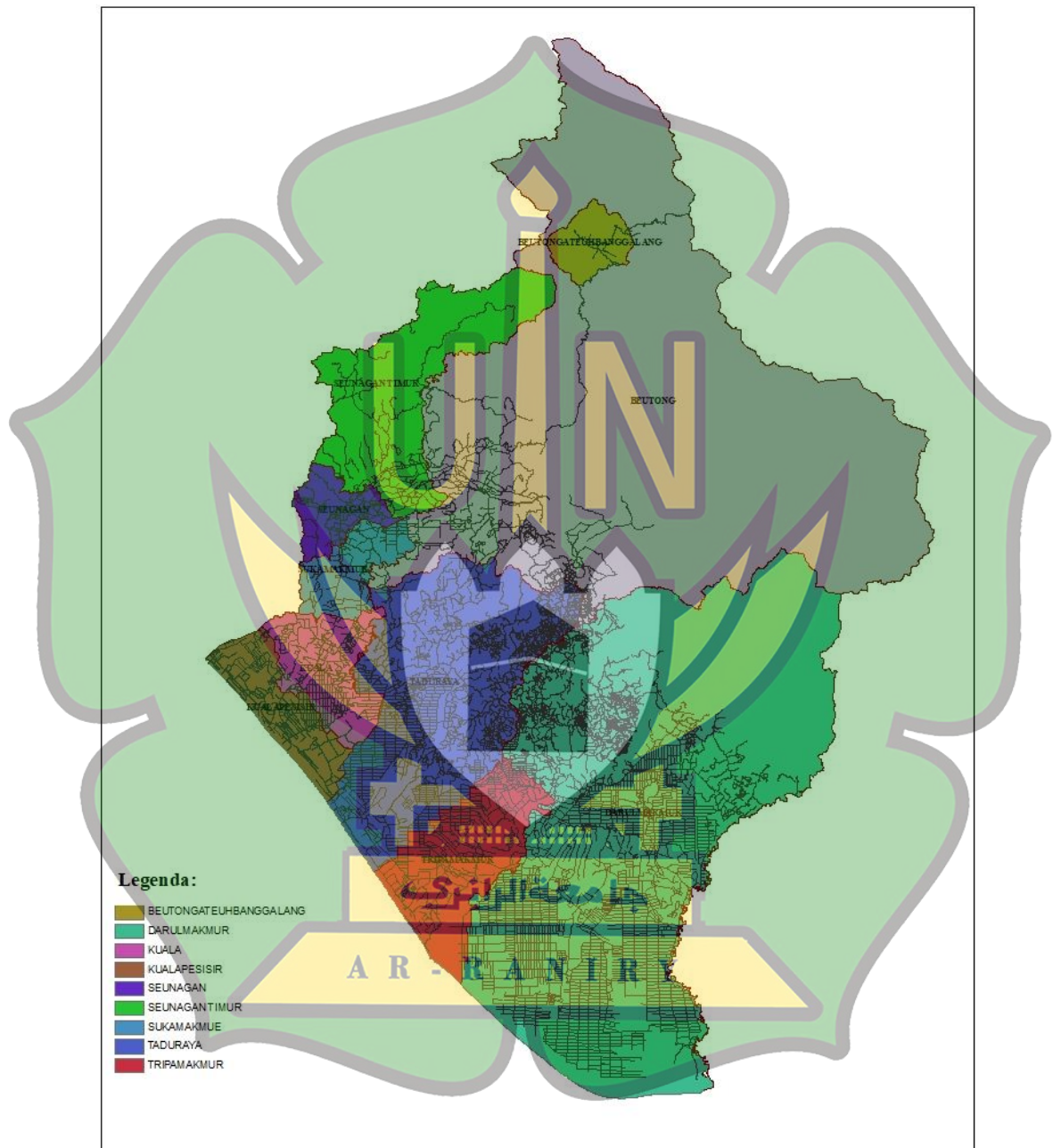
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tengah;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Nagan Raya memiliki luas wilayah sekitar 3.363,72 km² yang terdiri atas kawasan permukiman, perkebunan, pertanian, kawasan hutan, dan wilayah perairan.⁴⁹ Kabupaten Nagan Raya memiliki jumlah penduduk yang tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasi cukup tinggi pada wilayah yang berkembang secara ekonomi dan memiliki aktivitas perkebunan. Masyarakat Kabupaten Nagan Raya terdiri atas berbagai kelompok pekerjaan, seperti petani, pekebun, pedagang, pegawai pemerintah, pelaku usaha, serta pekerja sektor jasa. Namun sektor perkebunan masih menjadi salah satu sektor utama penyerap tenaga kerja. Perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di daerah ini turut memengaruhi kebutuhan pembangunan daerah, termasuk perlindungan terhadap sektor perkebunan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat.

Secara administratif Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 10 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, namun sebagian besar

⁴⁹ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, "Kondisi Geografis," Nagan Raya Mandiri dan Madani, 2026, <https://naganrayakab.go.id/halaman/kondisi-geografis>.

masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan perkebunan, terutama kelapa sawit.⁵⁰



Gambar 4.1 Lokasi Penelitian

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan ArcGIS (2026)

⁵⁰ Raya.

4.2 Kondisi Ekonomi dan Potensi Perkebunan Kelapa Sawit

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Nagan Raya yang memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Komoditas utama yang berkembang di wilayah ini adalah kelapa sawit. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya didukung oleh kondisi geografis yang sesuai serta keberadaan sejumlah perusahaan pengolahan kelapa sawit atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS).



Gambar 4.2 Kondisi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2026)

Selain perusahaan besar, perkebunan rakyat juga berkembang cukup luas dan menjadi sumber pendapatan utama masyarakat pedesaan. Aktivitas ekonomi masyarakat tidak hanya terbatas pada budidaya tanaman sawit, tetapi juga melibatkan kegiatan distribusi, pengangkutan, hingga perdagangan hasil perkebunan. Keberadaan industri kelapa sawit memberikan dampak positif

terhadap peningkatan ekonomi daerah, namun pada sisi lain juga menimbulkan tantangan berupa fluktuasi harga TBS yang memengaruhi pendapatan petani.⁵¹



Gambar 4.3 Tumpukan Hasil Panen Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2026)

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terlihat bahwa petani kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya mengumpulkan hasil panen berupa Tandan Buah Segar (TBS) sebelum diangkut ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Aktivitas panen dan pemasaran TBS yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Hasil observasi juga memperlihatkan bahwa kualitas dan jumlah TBS yang dihasilkan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga jual yang diterima petani.

⁵¹ Safitri Erna et al., "Peranan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Nagan Raya," *Dharma Ekonomi* 33, no. 1 (2026): 01–11.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Strategi Politik Bupati Nagan Raya Dalam Intervensi Stabilisasi Harga TBS

Strategi politik pemerintah daerah merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu, termasuk dalam menjaga stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Sebagai salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Nagan Raya, perubahan harga TBS memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya petani kelapa sawit. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan berbagai bentuk intervensi guna meminimalkan dampak fluktuasi harga yang dapat merugikan petani.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, petani kelapa sawit, dan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS), ditemukan bahwa pemerintah daerah menjalankan berbagai strategi dalam menjaga stabilitas harga TBS. Strategi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengawasan harga, tetapi juga mencakup koordinasi dengan berbagai pihak, penyampaian informasi harga kepada masyarakat, serta upaya mediasi antara petani dan perusahaan. Untuk memahami strategi tersebut secara lebih mendalam, pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu kondisi harga TBS menurut pemerintah, strategi yang dilakukan pemerintah daerah, serta analisis berdasarkan teori strategi politik.

- a. Kondisi harga TBS menurut pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya menilai bahwa kondisi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit saat ini masih mengalami fluktuasi, meskipun secara umum berada dalam kondisi yang relatif stabil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Fluktuasi harga tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi pasar nasional maupun pasar global, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengendalikan harga secara langsung.

Hasil wawancara dengan Bapak NA selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya menunjukkan bahwa harga TBS di Kabupaten Nagan Raya masih mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Menurut beliau, harga TBS terkadang mengalami kenaikan dan terkadang mengalami penurunan, namun kondisi tersebut masih berada dalam kategori cukup stabil dibandingkan sebelumnya. Beliau menyatakan:

*“Harga TBS sekarang relatif mengikuti kondisi pasar. Memang ada perubahan dari waktu ke waktu, tapi sejauh ini masih dalam kondisi yang masih dipantau.....”*⁵²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya fluktuasi harga yang masih terjadi di tingkat petani. Namun, pemerintah menilai bahwa perubahan harga yang terjadi belum sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan karena masih dapat dipantau dan dikendalikan melalui

⁵² Hasil wawancara dengan bapak NA, selaku kepala bidang pengembangan dan produksi di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

mekanisme pengawasan serta koordinasi dengan pihak terkait. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ibu KD selaku Pengawasan Benih Tanaman Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya. Menurut beliau, harga TBS saat ini masih mengikuti kondisi pasar yang berlaku. Perubahan harga memang terjadi secara berkala, namun masih berada dalam kondisi yang dapat dipantau oleh pemerintah. Beliau menjelaskan:

“Harga TBS sekarang relatif mengikuti kondisi pasar. Memang ada perubahan dari waktu ke waktu, tapi sejauh ini masih dalam kondisi yang masih dipantau. Yang sering jadi perhatian biasanya saat harga turun dan petani mulai mengeluh.”⁵³

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah daerah memandang harga TBS sebagai komoditas yang sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Perubahan harga yang terjadi tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. Fokus pemerintah lebih diarahkan pada pengawasan kondisi pasar dan upaya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penurunan harga terhadap petani. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah memahami adanya kekhawatiran yang dirasakan oleh petani akibat ketidakstabilan harga TBS. Meskipun harga saat ini dianggap relatif stabil, petani masih merasakan ketidakpastian karena harga dapat berubah dalam waktu yang singkat.

⁵³ Hasil wawancara dengan ibu KD, selaku pengawas benih tanaman di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan petani ikut mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan harga di pasar.

Pemerintah daerah menilai bahwa salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas harga TBS adalah adanya pengaruh faktor eksternal yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Menurut Bapak NA, harga sawit sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar yang lebih luas sehingga tidak seluruh perubahan harga dapat dikendalikan di tingkat daerah. Beliau menyatakan:

“Kendalanya karena harga sawit juga dipengaruhi kondisi pasar yang lebih luas, jadi tidak semuanya bisa dikendalikan dari daerah. Informasi yang diterima petani kadang berbeda-beda sehingga bisa menimbulkan salah paham soal harga. Kadang petani merasa harga yang diterima kurang sesuai harapan, sementara pihak perusahaan punya pertimbangan sendiri berdasarkan kondisi pasar dan operasional mereka.”⁵⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu KD yang menjelaskan bahwa perubahan harga TBS dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar pemerintah daerah, termasuk perubahan kondisi pasar yang berlangsung sangat cepat. Menurut beliau:

“Tantangannya karena harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, bukan dari daerah aja. Kadang kondisi pasar berubah cepat, jadi perlu penyesuaian.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak NA, selaku kepala bidang pengembangan dan produksi di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

Selain itu masih ada petani yang berharap pemerintah bisa langsung menentukan harga, padahal mekanismenya tidak sesederhana itu.”⁵⁵

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Nagan Raya memandang kondisi harga TBS saat ini masih mengalami fluktuasi, namun relatif lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya. Harga TBS pada dasarnya mengikuti dinamika pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga CPO, kondisi pasar, kualitas buah, serta jumlah pasokan yang tersedia. Pemerintah daerah lebih berfokus pada upaya pemantauan dan pengawasan harga daripada melakukan intervensi langsung terhadap mekanisme pembentukan harga. Pemerintah juga menyadari bahwa stabilitas harga TBS sangat penting karena berhubungan langsung dengan pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

b. Strategi yang dilakukan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menjaga stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit lebih menitikberatkan pada fungsi pengawasan, koordinasi, penyebaran informasi, serta fasilitasi komunikasi antara petani dan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga TBS secara langsung, karena harga TBS sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan harga *Crude Palm Oil*

⁵⁵ Hasil wawancara dengan ibu KD, selaku pengawas benih tanaman di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

(CPO). Maka, strategi yang diterapkan lebih diarahkan pada upaya menciptakan tata kelola harga yang transparan dan menjaga keseimbangan kepentingan antara petani dan perusahaan.

Salah satu strategi utama yang dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan harga TBS di lapangan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui perubahan harga yang terjadi serta memastikan harga yang diterapkan oleh perusahaan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Melalui pengawasan tersebut, pemerintah dapat mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi petani serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam praktik penjualan TBS. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak NA selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya yang menyatakan bahwa pemerintah secara rutin memantau perkembangan harga TBS yang berlaku di lapangan. Selain itu, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan serta menerima berbagai keluhan yang disampaikan oleh petani.

*“Yang kami lakukan biasanya memantau perkembangan harga di lapangan, koordinasi dengan pihak pabrik, sama menyampaikan informasi harga ke masyarakat. Selain itu kalau ada keluhan dari petani juga kami tampung dan coba komunikasikan dengan pihak terkait.”*⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak NA, selaku kepala bidang pengembangan dan produksi di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk selalu mengikuti perkembangan harga TBS agar dapat memahami kondisi yang terjadi di tingkat petani maupun perusahaan. Pemantauan yang dilakukan juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah koordinasi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga. Strategi berikutnya adalah membangun koordinasi dengan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Koordinasi dilakukan karena perusahaan merupakan pihak yang berperan langsung dalam proses pembelian TBS dari petani. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berusaha menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dan petani sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait harga yang berlaku.

Ibu KD selaku Pengawasan Benih Tanaman Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya menjelaskan bahwa pemerintah secara rutin melakukan koordinasi dengan pihak pabrik dan melakukan kunjungan ke lapangan apabila diperlukan.

*“Kami rutin koordinasi dengan pihak pabrik dan juga turun ke lapangan kalau diperlukan. Selain itu kami juga menyampaikan informasi harga supaya petani punya gambaran dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas.”*⁵⁷

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi pasar, faktor-faktor yang memengaruhi

⁵⁷ Hasil wawancara dengan ibu KD, selaku pengawas benih tanaman di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

perubahan harga, serta kendala yang dihadapi perusahaan dalam proses pembelian TBS. Sehingga, pemerintah dapat mengambil posisi yang lebih objektif dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara petani dan perusahaan. Selain melakukan pengawasan dan koordinasi, pemerintah daerah juga menerapkan strategi penyebaran informasi harga kepada masyarakat, khususnya petani kelapa sawit. Informasi harga dianggap penting karena masih banyak petani yang memperoleh informasi dari sumber yang tidak jelas sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai harga yang sebenarnya berlaku di pasar. Maka sebab itu, pemerintah berupaya memberikan informasi harga yang akurat agar petani memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi pasar.

Penyampaian informasi harga juga menjadi salah satu bentuk transparansi pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan adanya informasi yang jelas, petani dapat mengetahui perkembangan harga TBS dan memiliki dasar yang lebih kuat dalam melakukan transaksi penjualan hasil panen mereka. Strategi lainnya adalah menampung dan menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan oleh petani. Pemerintah daerah membuka ruang komunikasi bagi petani untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan harga maupun proses penjualan TBS. Keluhan yang diterima kemudian dikomunikasikan kepada pihak terkait agar dapat dicari solusi yang tepat. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara petani dan

perusahaan. Ketika terjadi perbedaan pandangan mengenai harga TBS, pemerintah berupaya mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Bapak NA menjelaskan bahwa pemerintah berusaha menjadi penengah antara kepentingan petani dan perusahaan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

*“Kalau ada persoalan biasanya kami coba dengarkan kedua belah pihak. Dari petani maunya harga bagus, dari perusahaan jug ada pertimbangan operasional. Jadi kami bantu cari jalan tengah supaya tidak merugikan salah satu pihak.”*⁵⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan politik. Pemerintah berusaha menjaga hubungan yang harmonis antara petani dan perusahaan agar konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan dapat diminimalkan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjalankan strategi dengan tetap mengacu pada ketentuan dan kebijakan yang berlaku terkait harga TBS. Pemerintah berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar harga yang berlaku di lapangan tidak terlalu jauh berbeda dari ketentuan yang telah ditetapkan.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak NA, selaku kepala bidang pengembangan dan produksi di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

Menurut Bapak NA:

*“Ada arahan dan ketentuan yang jadi acuan terkait harga TBS. Tapi pemerintah daerah lebih banyak berperan dalam pengawasan dan koordinasi supaya harga yang berlaku di lapangan tidak terlalu jauh dan tetap sesuai ketentuan.”*⁵⁹

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menjaga stabilitas harga TBS meliputi empat aspek utama, yaitu (1) melakukan pengawasan dan pemantauan harga TBS, (2) membangun koordinasi dengan pihak PKS, (3) menyebarkan informasi harga kepada petani secara transparan, dan (4) memfasilitasi komunikasi serta penyelesaian permasalahan antara petani dan perusahaan. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih menekankan pendekatan koordinatif dan mediatif dalam menjaga stabilitas harga TBS, mengingat keterbatasan kewenangan daerah dalam menentukan harga secara langsung. Dengan strategi tersebut, pemerintah berupaya menciptakan kondisi pasar yang lebih kondusif serta melindungi kepentingan petani tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan sebagai pelaku usaha di sektor perkebunan kelapa sawit.

c. Analisis teori

Strategi politik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor politik untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak NA, selaku kepala bidang pengembangan dan produksi di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

kewenangan, pengaruh, dan sumber daya yang dimiliki. Menurut Schroder, strategi politik dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu strategi ofensif dan strategi defensif. Strategi ofensif digunakan untuk menciptakan perubahan dan memperluas pengaruh, sedangkan strategi defensif digunakan untuk mempertahankan kondisi yang ada serta melindungi kepentingan yang berpotensi terdampak oleh suatu permasalahan.⁶⁰

Berdasarkan hasil penelitian, strategi politik yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menjaga stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) lebih mengarah pada strategi defensif. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan meminimalkan dampak fluktuasi harga terhadap petani kelapa sawit. Pemerintah tidak melakukan intervensi secara langsung terhadap mekanisme pembentukan harga, tetapi berupaya menjaga keseimbangan hubungan antara petani dan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melalui pengawasan, koordinasi, dan mediasi.

Hasil wawancara dengan Bapak NA selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara aktif melakukan pemantauan harga di lapangan, berkoordinasi dengan pihak pabrik, serta menyampaikan informasi harga kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menerima

⁶⁰ Samsir Hamajen, Asep Setiawan, and Lusi Andriyani, "Strategi Politik Pemenangan Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba Di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan 2020," *Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 4, no. 1 (2023): 7–20, <https://doi.org/10.24853/independen.4.1.7->.

dan menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan petani terkait harga TBS. Menurut beliau:

*“Yang kami lakukan biasanya memantau perkembangan harga di lapangan, koordinasi dengan pihak pabrik, sama menyampaikan informasi harga ke masyarakat. Selain itu kalau ada keluhan dari petani juga kami tampung dan coba komunikasikan dengan pihak terkait.”*⁶¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menjaga stabilitas kondisi yang ada melalui pendekatan koordinatif dan komunikatif, bukan melalui kebijakan yang bersifat memaksa. Strategi tersebut sesuai dengan konsep strategi defensif yang dikemukakan oleh Schroder, yaitu strategi yang berorientasi pada upaya mempertahankan stabilitas dan melindungi kelompok yang rentan terdampak oleh suatu kebijakan atau kondisi tertentu.⁶²

Pemerintah daerah juga menjalankan strategi politik melalui fungsi mediasi antara petani dan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah berupaya mempertemukan kedua pihak ketika terjadi perbedaan kepentingan terkait harga TBS. Bapak NA menjelaskan bahwa pemerintah berusaha mencari jalan tengah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Langkah ini menunjukkan adanya penggunaan strategi politik dalam bentuk

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak NA, selaku kepala bidang pengembangan dan produksi di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

⁶² Samsir Hamajen, Asep Setiawan, and Lusi Andriyani, “Strategi Politik Pemenangan Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba Di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan 2020,” *Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 4, no. 1 (2023): 7–20, <https://doi.org/10.24853/independen.4.1.7->.

negosiasi dan kompromi untuk menjaga hubungan yang harmonis antara petani dan perusahaan. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Rusdiyanta, Subiyakto, dan Pujiyono yang menyatakan bahwa strategi politik dalam kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan penyusunan kebijakan, tetapi juga mencakup berbagai upaya yang dilakukan aktor kebijakan untuk memengaruhi jalannya proses kebijakan melalui pengelolaan aktor, konteks, dan sumber daya yang dimiliki. Dalam penelitian ini, pemerintah daerah memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan, membangun komunikasi dengan perusahaan, serta memberikan informasi kepada petani sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga TBS.⁶³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari keterbatasan kewenangannya dalam mengendalikan harga TBS secara langsung. Menurut Bapak NA, harga sawit dipengaruhi oleh kondisi pasar yang lebih luas sehingga tidak seluruh perubahan harga dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk lebih menekankan strategi koordinasi dan pengawasan dibandingkan intervensi langsung terhadap harga. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyesuaikan strategi politiknya dengan kondisi dan kewenangan yang dimiliki agar tujuan menjaga stabilitas harga tetap dapat tercapai.

⁶³ Rusdiyanta, Rudi Subiyakto, and Bambang Pujiyono, *Kebijakan Publik Aktor, Model Dan Proses* (Yogyakarta: CV. Graha Ilmu dengan, 2022).

Apabila dianalisis berdasarkan teori strategi politik, maka langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mencerminkan strategi defensif karena bertujuan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, melindungi kepentingan petani, serta mencegah munculnya konflik antara petani dan perusahaan. Pemerintah tidak berupaya mengubah mekanisme pasar yang berlaku, tetapi lebih fokus pada penguatan komunikasi, pengawasan, dan koordinasi antaraktor yang terlibat dalam tata niaga TBS. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha mempertahankan kondisi yang kondusif bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan teori strategi politik Schroder, strategi politik Bupati Nagan Raya dalam intervensi stabilisasi harga TBS dapat dikategorikan sebagai strategi defensif, yaitu strategi yang bertujuan mempertahankan stabilitas harga, melindungi pendapatan petani, serta menjaga hubungan yang harmonis antara petani dan pihak PKS melalui pengawasan, koordinasi, komunikasi, dan mediasi. Strategi tersebut menjadi bentuk nyata peran pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit.

4.3.2 Posisi dan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Mediator Konflik Antara PKS dan Petani

Dalam tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, hubungan antara petani dan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak selalu berjalan tanpa permasalahan. Perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh kedua pihak sering kali menimbulkan ketidaksepahaman, terutama terkait penetapan harga, kualitas

TBS, serta mekanisme pembelian hasil panen. Petani pada umumnya menginginkan harga jual yang tinggi agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, sedangkan pihak perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor operasional dan kondisi pasar dalam menentukan harga pembelian TBS. Perbedaan kepentingan tersebut berpotensi memunculkan konflik yang dapat memengaruhi hubungan antara petani dan perusahaan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai mediator yang bertugas menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu menciptakan komunikasi yang baik antara petani dan perusahaan. Melalui peran tersebut, pemerintah berupaya mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan serta mencari solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah daerah dalam memediasi konflik kepentingan antara petani dan pihak PKS dapat dilihat dari bentuk-bentuk konflik yang muncul di lapangan serta langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut.

a. Bentuk konflik yang muncul

Berdasarkan hasil penelitian, konflik yang muncul antara petani kelapa sawit dan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Nagan Raya umumnya berkaitan dengan perbedaan kepentingan dalam penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS). Konflik tersebut tidak selalu berbentuk perselisihan terbuka, tetapi lebih sering muncul dalam bentuk keluhan, ketidakpuasan, serta perbedaan pandangan mengenai harga yang diterima

petani dan harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Kondisi ini terjadi karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda dalam proses transaksi TBS. Petani sebagai produsen menginginkan harga jual TBS yang tinggi agar dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik dan mampu menutupi biaya produksi yang terus meningkat. Sebaliknya, pihak perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti harga *Crude Palm Oil* (CPO), biaya operasional perusahaan, kualitas buah yang diterima, serta kondisi pasar yang berlaku. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya konflik antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak NA selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, konflik yang paling sering muncul berkaitan dengan ketidakpuasan petani terhadap harga yang ditetapkan perusahaan. Menurut beliau, petani umumnya menginginkan harga yang lebih tinggi, sedangkan perusahaan memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan harga pembelian TBS.

*“Kendalanya karena harga sawit juga dipengaruhi kondisi pasar yang lebih luas, jadi tidak semuanya bisa dikendalikan dari daerah. Informasi yang diterima petani kadang berbeda-beda sehingga bisa menimbulkan salah paham soal harga. Kadang petani merasa harga yang diterima kurang sesuai harapan, sementara pihak perusahaan punya pertimbangan sendiri berdasarkan kondisi pasar dan operasional mereka.”*⁶⁴

⁶⁴ Hasil wawancara dengan bapak NA, selaku kepala bidang pengembangan dan produksi di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi lebih banyak dipicu oleh perbedaan persepsi mengenai harga yang dianggap layak oleh masing-masing pihak. Petani melihat harga dari sisi keuntungan yang ingin diperoleh, sedangkan perusahaan melihat harga dari aspek ekonomi dan keberlanjutan usaha. Selain persoalan harga, konflik juga muncul akibat perbedaan penilaian terhadap kualitas TBS yang dijual petani. Perusahaan memiliki standar kualitas tertentu yang menjadi dasar dalam menentukan harga pembelian. Ketika kualitas buah dinilai kurang memenuhi standar, perusahaan akan melakukan pemotongan harga. Kondisi tersebut sering menimbulkan ketidakpuasan dari pihak petani yang merasa hasil panennya masih layak memperoleh harga yang lebih tinggi.

Hasil wawancara dengan pihak PKS menunjukkan bahwa kualitas buah menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembelian TBS. Menurut pihak perusahaan, harga yang diberikan kepada petani tidak hanya ditentukan oleh harga pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas buah yang diterima. Perbedaan pemahaman mengenai standar kualitas inilah yang terkadang memicu munculnya keluhan dari petani. Konflik juga dapat muncul akibat kurangnya informasi yang diterima petani mengenai mekanisme pembentukan harga TBS. Sebagian petani tidak sepenuhnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga sehingga ketika terjadi penurunan harga, petani cenderung menganggap perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Padahal, perubahan harga juga

dipengaruhi oleh kondisi pasar global, harga CPO, serta faktor ekonomi lainnya yang berada di luar kendali perusahaan maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan NA selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, keluhan petani umumnya meningkat ketika harga TBS mengalami penurunan. Pada kondisi tersebut, pemerintah sering menerima laporan maupun aspirasi dari petani yang meminta penjelasan mengenai penyebab turunnya harga.

*“Kalau dilihat sekarang harga TBS memang masih berubah-ubah, kadang naik kadang turun. Tapi dibanding sebelumnya masih termasuk cukup stabil. Cuma memang petani ini sering berharap harga bisa lebih tinggi lagi supaya pendapatan mereka lebih bagus. Kadang kalau harga turun biasanya petani mulai mempertanyakan harga yang berlaku dan menyampaikan keluhan kepada pemerintah maupun perusahaan.”*⁶⁵

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya masih berada dalam kategori konflik kepentingan yang dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi. Hingga saat ini konflik yang muncul belum berkembang menjadi konflik yang bersifat destruktif atau menimbulkan gangguan serius terhadap aktivitas perkebunan. Hal ini karena masih terdapat ruang komunikasi antara petani, perusahaan,

⁶⁵ Hasil wawancara dengan bapak NA, selaku kepala bidang pengembangan dan produksi di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

dan pemerintah daerah dalam menyampaikan aspirasi maupun menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa bentuk konflik yang muncul antara petani dan pihak PKS di Kabupaten Nagan Raya terutama berkaitan dengan perbedaan kepentingan dalam penentuan harga TBS, perbedaan penilaian terhadap kualitas buah, serta kurangnya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga TBS. Konflik tersebut muncul karena petani mengharapkan harga yang lebih tinggi untuk meningkatkan pendapatan, sedangkan perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan operasional dalam menentukan harga pembelian TBS. Meskipun demikian, konflik yang terjadi masih dapat dikelola melalui komunikasi, koordinasi, dan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

b. Peran pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memiliki peran penting sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik kepentingan yang muncul antara petani kelapa sawit dan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Peran ini dijalankan karena pemerintah daerah merupakan pihak yang memiliki posisi netral dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial maupun ekonomi masyarakat. Dalam konteks tata niaga Tandan Buah Segar (TBS), pemerintah berupaya menjembatani perbedaan kepentingan antara petani yang menginginkan harga tinggi dengan perusahaan yang harus mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi

dan operasional dalam menentukan harga pembelian TBS. Sebagai mediator, pemerintah daerah tidak bertindak sebagai pihak yang memihak salah satu kelompok, melainkan berupaya menciptakan komunikasi yang baik antara petani dan perusahaan. Pemerintah berusaha mendengarkan aspirasi dari kedua belah pihak, memahami permasalahan yang terjadi, kemudian memfasilitasi proses penyelesaian agar diperoleh solusi yang dapat diterima bersama. Peran tersebut menjadi penting karena konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ketegangan antara petani dan perusahaan yang pada akhirnya berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak NA selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, pemerintah daerah berupaya mempertemukan kepentingan petani dan perusahaan ketika terjadi permasalahan terkait harga TBS. Menurut beliau:

“Kalau ada persoalan biasanya kami coba dengarkan kedua belah pihak. Dari petani maunya harga bagus, dari perusahaan jug ada pertimbangan operasional. Jadi kami bantu cari jalan tengah supaya tidak merugikan salah satu pihak.”⁶⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan fungsi mediasi dengan cara membuka ruang dialog bagi kedua belah pihak. Pemerintah tidak secara langsung menentukan keputusan, tetapi berperan memfasilitasi komunikasi sehingga setiap pihak dapat menyampaikan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak NA, selaku kepala bidang pengembangan dan produksi di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

pandangan dan kepentingannya masing-masing. Melalui dialog tersebut, pemerintah berupaya menemukan titik temu yang dapat diterima oleh petani maupun perusahaan. Selain menjadi penghubung antara petani dan perusahaan, pemerintah juga berperan dalam menerima dan menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat. Keluhan yang diterima dari petani kemudian dikomunikasikan kepada pihak perusahaan agar dapat diperoleh penjelasan maupun solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, pemerintah menjadi saluran komunikasi yang membantu mengurangi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Peran mediasi pemerintah juga terlihat dari upaya penyampaian informasi yang dilakukan kepada petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu KD selaku Pengawasan Benih Tanaman Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, pemerintah secara aktif memberikan informasi mengenai perkembangan harga TBS kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar petani memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi pasar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.

*“Kami rutin koordinasi dengan pihak pabrik dan juga turun ke lapangan kalau diperlukan. Selain itu kami juga menyampaikan informasi harga supaya petani punya gambaran dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas.”*⁶⁷

⁶⁷ Hasil wawancara dengan ibu KD, selaku pengawas benih tanaman di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

Penyampaian informasi tersebut merupakan bagian dari fungsi mediasi pemerintah karena banyak konflik yang muncul disebabkan oleh kurangnya informasi atau perbedaan pemahaman mengenai mekanisme pembentukan harga TBS. Dengan adanya informasi yang jelas dan terbuka, petani dapat memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga sehingga potensi munculnya konflik dapat diminimalkan. Dari sisi perusahaan, peran pemerintah sebagai mediator juga dinilai sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PKS, pemerintah dianggap sebagai pihak yang mampu menjaga keseimbangan hubungan antara petani dan perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa pemerintah memiliki posisi yang lebih netral sehingga dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Menurut Bapak AR selaku pihak PKS:

*“Menurut kami pemerintah penting buat jadi penengah. Soalnya kadang petani maunya harga naik terus, sementara perusahaan juga lihat kondisi pasar. Jadi pemerintah bisa bantu kasih arahan dan menjaga supaya tetap seimbang.”*⁶⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pemerintah sebagai mediator tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh petani, tetapi juga oleh perusahaan. Pemerintah menjadi pihak yang dapat menjembatani komunikasi sehingga hubungan kerja sama antara petani dan perusahaan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan bapak AR, selaku Pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada 04 Juni 2026

tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah daerah sebagai mediator konflik dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu mendengarkan aspirasi kedua belah pihak, memfasilitasi dialog dan komunikasi, menindaklanjuti keluhan masyarakat, melakukan koordinasi dengan perusahaan, serta memberikan informasi yang transparan mengenai perkembangan harga TBS. Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah berusaha menciptakan hubungan yang harmonis antara petani dan perusahaan serta mencegah konflik berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menjalankan fungsi mediator dalam penyelesaian konflik kepentingan antara petani dan pihak PKS. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya menjembatani komunikasi, memfasilitasi penyelesaian masalah, serta menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak. Kehadiran pemerintah sebagai mediator menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas hubungan antara petani dan perusahaan serta mendukung upaya menjaga stabilitas harga TBS di Kabupaten Nagan Raya.

4.3.3 Hambatan Struktural dan Faktor Determinan Efektivitas Kebijakan

Upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, koordinasi, serta mediasi antara petani dan

pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS), pemerintah daerah menghadapi kondisi yang dapat mendukung maupun menghambat tercapainya tujuan kebijakan. Keberadaan faktor-faktor tersebut sangat menentukan efektivitas strategi yang dijalankan dalam menjaga stabilitas harga TBS dan melindungi kepentingan petani. Faktor pendukung merupakan kondisi yang membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga berbagai program dan upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan lebih efektif. Sebaliknya, faktor penghambat merupakan berbagai kendala yang dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam mengendalikan atau memengaruhi stabilitas harga TBS. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari aspek internal pemerintah maupun dari faktor eksternal yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga TBS, serta sejumlah hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya. Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat yang memengaruhi peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga TBS di Kabupaten Nagan Raya.

a. Faktor pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menjalankan strategi stabilisasi harga Tandan Buah Segar (TBS) tidak terlepas dari adanya beberapa faktor pendukung. Faktor-faktor tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan, koordinasi, dan mediasi antara petani dan pihak Pabrik Kelapa

Sawit (PKS). Keberadaan faktor pendukung tersebut membantu pemerintah dalam menciptakan komunikasi yang baik antar pihak yang terlibat sehingga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan harga TBS dapat ditangani dengan lebih efektif.

Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya koordinasi dan kerja sama yang cukup baik antara pemerintah daerah dengan pihak PKS maupun petani kelapa sawit. Hubungan yang terjalin antara berbagai pihak tersebut memudahkan pemerintah dalam memperoleh informasi terkait kondisi harga TBS, menyampaikan kebijakan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Melalui koordinasi yang baik, pemerintah dapat menjalankan perannya sebagai penghubung antara petani dan perusahaan dalam menjaga stabilitas harga TBS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak NA selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah adalah adanya komunikasi yang cukup baik dengan pihak-pihak terkait. Menurut beliau:

“Kalau ada persoalan biasanya kami coba dengarkan kedua belah pihak. Dari petani maunya harga bagus, dari perusahaan juga ada pertimbangan operasional. Jadi kami bantu cari jalan tengah supaya tidak merugikan salah satu pihak.”⁶⁹

⁶⁹ Hasil wawancara dengan bapak NA, selaku kepala bidang pengembangan dan produksi di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan strategi pemerintah daerah. Dengan adanya komunikasi yang lancar, pemerintah dapat lebih cepat mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi petani maupun perusahaan sehingga langkah penyelesaian dapat segera dilakukan.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya partisipasi masyarakat, khususnya petani kelapa sawit, dalam menyampaikan informasi dan keluhan yang mereka alami. Keterbukaan petani dalam menyampaikan permasalahan yang terjadi membantu pemerintah dalam memahami kondisi yang sebenarnya di lapangan. Informasi yang diperoleh dari petani menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan koordinasi dan mengambil langkah yang diperlukan dalam menjaga stabilitas harga TBS. Keberadaan Dinas Perkebunan sebagai instansi teknis yang menangani sektor perkebunan juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Dinas Perkebunan memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan harga, mengumpulkan informasi dari lapangan, serta menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan dan petani. Melalui fungsi tersebut, pemerintah daerah memiliki akses terhadap data dan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil wawancara dengan Ibu KD selaku Pengawasan Benih Tanaman Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya menunjukkan bahwa dukungan dari berbagai pihak menjadi salah satu faktor yang membantu pemerintah dalam menjalankan tugas pengawasan dan koordinasi. Menurut beliau:

“Peran kami lebih ke memfasilitasi komunikasi. Kalau ada persoalan tentang harga atau proses penjualan biasanya kami bantu mempertemukan dan mencari solusi yang bisa diterima bersama.”⁷⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga TBS tidak hanya bergantung pada pemerintah itu sendiri, tetapi juga pada kesediaan seluruh pihak untuk bekerja sama dan membangun komunikasi yang baik. Kerja sama yang terjalin memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara petani dan perusahaan sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Selain faktor komunikasi dan kerja sama, faktor pendukung lainnya adalah tersedianya informasi mengenai perkembangan harga TBS yang dapat diakses oleh pemerintah daerah. Informasi tersebut membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap perubahan harga serta memberikan penjelasan kepada petani mengenai kondisi pasar yang sedang terjadi. Dengan adanya informasi yang memadai, pemerintah dapat menjalankan fungsi pengawasan dan mediasi secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung yang paling dominan dalam upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas harga TBS adalah adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, petani, dan pihak PKS; partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi dan keluhan; dukungan dari instansi teknis terkait; serta keterbukaan informasi mengenai perkembangan

⁷⁰ Hasil wawancara dengan ibu KD, selaku pengawas benih tanaman di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

harga TBS. Faktor-faktor tersebut memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pengawas, fasilitator, dan mediator dalam menjaga stabilitas harga TBS di Kabupaten Nagan Raya.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga TBS sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang baik, kerja sama antar pihak yang terlibat, dukungan kelembagaan, serta ketersediaan informasi yang memadai. Faktor-faktor tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai strategi untuk melindungi kepentingan petani dan menjaga hubungan yang harmonis dengan pihak perusahaan.

b. Faktor penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan strategi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menjaga stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) tidak selalu berjalan dengan mudah. Dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, koordinasi, dan mediasi antara petani dan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Faktor-faktor tersebut sebagian besar berasal dari kondisi eksternal yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menjaga stabilitas harga TBS. Salah satu faktor penghambat utama adalah tingginya pengaruh mekanisme pasar terhadap pembentukan harga TBS. Harga TBS tidak hanya ditentukan oleh kondisi di tingkat daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh harga *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar nasional dan internasional. Kondisi tersebut

menyebabkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengendalikan perubahan harga yang terjadi. Ketika harga CPO mengalami penurunan, harga TBS yang diterima petani juga cenderung mengalami penurunan meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan koordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak NA selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, salah satu kendala terbesar yang dihadapi pemerintah adalah karena harga sawit dipengaruhi oleh kondisi pasar yang lebih luas sehingga tidak seluruh perubahan harga dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. Beliau menyatakan:

“Kendalanya karena harga sawit juga dipengaruhi kondisi pasar yang lebih luas, jadi tidak semuanya bisa dikendalikan dari daerah.....”⁷¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam menentukan harga TBS. Meskipun pemerintah dapat melakukan pengawasan dan koordinasi, keputusan akhir mengenai harga tetap dipengaruhi oleh dinamika pasar yang berada di luar kontrol pemerintah daerah.

Faktor penghambat berikutnya adalah perubahan kondisi pasar yang berlangsung secara cepat dan sulit diprediksi. Fluktuasi harga yang terjadi

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak NA, selaku kepala bidang pengembangan dan produksi di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

dalam waktu singkat sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi petani maupun pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah harus terus melakukan penyesuaian dalam menjalankan strategi yang telah direncanakan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu KD selaku Pengawasan Benih Tanaman Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya yang menjelaskan bahwa perubahan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar daerah dan sering kali berubah dalam waktu yang cepat.

“Tantangannya karena harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, bukan dari daerah aja. Kadang kondisi pasar berubah cepat, jadi perlu penyesuaian.”

72

Selain pengaruh pasar, faktor penghambat lainnya adalah perbedaan kepentingan antara petani dan pihak perusahaan. Petani umumnya mengharapkan harga TBS yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan mereka, sedangkan perusahaan harus mempertimbangkan biaya operasional, kualitas buah, serta kondisi pasar dalam menentukan harga pembelian. Perbedaan kepentingan tersebut sering kali memunculkan ketidakpuasan yang dapat menghambat proses komunikasi dan penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman sebagian petani mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga TBS. Ketika harga mengalami penurunan, sebagian petani cenderung menganggap bahwa perusahaan atau

⁷² Hasil wawancara dengan ibu KD, selaku pengawas benih tanaman di Dinas Perkebunan Nagan Raya pada 01 Juni 2026

pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Padahal, perubahan harga juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga CPO dunia, permintaan pasar, dan kondisi ekonomi global. Kurangnya pemahaman ini terkadang menimbulkan kesalahpahaman yang menyulitkan pemerintah dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Luasnya wilayah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengawasan. Pemerintah daerah harus melakukan pemantauan terhadap berbagai lokasi perkebunan dan menjalin komunikasi dengan banyak pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Kondisi tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tidak sedikit agar pengawasan dapat dilakukan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan langsung dengan penetapan harga TBS. Pemerintah daerah pada dasarnya hanya memiliki peran dalam pengawasan, koordinasi, dan fasilitasi komunikasi. Sementara itu, harga TBS lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar serta berbagai kebijakan yang ditetapkan pada tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya, ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan intervensi terhadap harga menjadi relatif terbatas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat upaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menjaga stabilitas harga TBS meliputi pengaruh mekanisme pasar global dan

nasional, fluktuasi harga CPO, perubahan kondisi pasar yang sulit diprediksi, perbedaan kepentingan antara petani dan perusahaan, kurangnya pemahaman sebagian petani mengenai mekanisme pembentukan harga, serta keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga secara langsung. Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan perannya sebagai pengawas, fasilitator, dan mediator guna menjaga stabilitas harga TBS serta melindungi kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Meskipun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga TBS secara langsung, pemerintah tetap berupaya melakukan berbagai strategi melalui pengawasan, koordinasi, penyampaian informasi, serta mediasi antara petani dan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai aktor yang berusaha menjaga keseimbangan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam tata niaga kelapa sawit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi harga TBS di Kabupaten Nagan Raya masih mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti harga *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar nasional dan internasional, kondisi permintaan pasar, serta kualitas buah yang dihasilkan petani. Pemerintah daerah

menyadari bahwa harga TBS tidak sepenuhnya dapat dikendalikan melalui kebijakan daerah karena mekanisme pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar yang lebih luas. Maka, strategi yang dilakukan pemerintah lebih berorientasi pada upaya menjaga stabilitas dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan harga terhadap petani.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Schroder yang menyatakan bahwa strategi politik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya dan kewenangan yang dimiliki oleh aktor politik. Pemerintah daerah menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan, membangun koordinasi dengan perusahaan, serta memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk strategi dalam menjaga stabilitas harga TBS. Strategi tersebut tidak dilakukan melalui intervensi langsung terhadap harga, melainkan melalui pendekatan koordinatif dan komunikatif yang melibatkan berbagai pihak.⁷³

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjalankan fungsi mediasi dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara petani dan pihak PKS. Konflik yang muncul umumnya berkaitan dengan perbedaan kepentingan dalam penentuan harga TBS. Petani menginginkan harga yang lebih tinggi agar memperoleh pendapatan yang lebih baik, sedangkan perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan operasional dalam menentukan

⁷³ Samsir Hamajen, Asep Setiawan, and Lusi Andriyani, "Strategi Politik Pemenangan Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba Di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan 2020," *Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 4, no. 1 (2023): 7–20, <https://doi.org/10.24853/independen.4.1.7->.

harga pembelian. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah berperan sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara kedua pihak agar konflik yang muncul tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Peran mediasi yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan konsep governance yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan publik. Pemerintah tidak lagi berperan sebagai satu-satunya pengambil keputusan, melainkan sebagai fasilitator yang mempertemukan berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan ruang dialog antara petani dan perusahaan sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi yang konstruktif.⁷⁴

Jika dianalisis menggunakan teori strategi politik Schroder, maka strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya lebih cenderung menggunakan strategi defensif. Menurut Schroder, strategi defensif merupakan strategi yang bertujuan mempertahankan kondisi yang telah ada dan melindungi kepentingan kelompok tertentu dari berbagai ancaman yang dapat merugikan. Dalam penelitian ini, pemerintah daerah berupaya mempertahankan stabilitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit dengan cara melakukan

⁷⁴ Putri Ayu Anisya, "Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH)* 3, no. 1 (2024): 94–100.

pengawasan harga, membangun koordinasi dengan PKS, memberikan informasi kepada petani, serta memediasi konflik yang terjadi.⁷⁵

Strategi defensif tersebut terlihat dari fokus pemerintah yang lebih menekankan pada perlindungan kepentingan petani dibandingkan melakukan perubahan terhadap sistem penentuan harga yang berlaku. Pemerintah berusaha memastikan bahwa petani memperoleh informasi yang benar mengenai perkembangan harga TBS dan memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan yang mereka hadapi. Pada saat yang sama, pemerintah juga menjaga hubungan yang baik dengan pihak perusahaan agar proses pembelian TBS tetap berjalan secara kondusif. Dengan demikian, strategi yang dilakukan pemerintah tidak bertujuan mengubah mekanisme pasar, melainkan menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan perusahaan.

Selain strategi yang dilakukan pemerintah, penelitian ini juga menemukan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan upaya stabilisasi harga TBS. Faktor pendukung utama adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, petani, dan pihak PKS. Hubungan yang terjalin dengan baik memudahkan proses pertukaran informasi serta penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Keterlibatan petani dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan juga membantu pemerintah dalam memahami kondisi yang sebenarnya terjadi. Hal lainnya terdapat beberapa

⁷⁵ Samsir Hamajen, Asep Setiawan, and Lusi Andriyani, "Strategi Politik Pemenangan Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba Di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan 2020," *Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 4, no. 1 (2023): 7–20, <https://doi.org/10.24853/independen.4.1.7->.

faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas strategi pemerintah daerah. Faktor penghambat yang paling dominan adalah pengaruh mekanisme pasar global terhadap harga TBS. Harga TBS sangat dipengaruhi oleh harga CPO dunia sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengendalikan perubahan harga yang terjadi. Perbedaan kepentingan antara petani dan perusahaan, perubahan kondisi pasar yang berlangsung cepat, serta keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan harga secara langsung juga menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga TBS.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas harga TBS melalui berbagai strategi yang bersifat koordinatif, komunikatif, dan mediatif. Strategi tersebut mencerminkan penerapan strategi politik defensif sebagaimana dikemukakan oleh Schroder, yaitu strategi yang bertujuan mempertahankan stabilitas ekonomi masyarakat, melindungi kepentingan petani, serta menjaga hubungan yang harmonis antara petani dan pihak PKS. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan fungsi pengawasan, koordinasi, dan mediasi sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Strategi politik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menjaga stabilitas harga TBS dilakukan melalui pengawasan, koordinasi, penyampaian informasi, dan mediasi antara petani dengan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga TBS secara langsung karena harga dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan harga *Crude Palm Oil* (CPO). Maka dari itu, pemerintah lebih berperan dalam memantau perkembangan harga, membangun komunikasi dengan pihak perusahaan, menyampaikan informasi harga kepada petani, serta menampung dan menindaklanjuti berbagai keluhan yang muncul di lapangan. Berdasarkan analisis teori strategi politik Schroder, strategi yang diterapkan pemerintah daerah cenderung menggunakan strategi defensif, yaitu strategi yang bertujuan mempertahankan stabilitas kondisi ekonomi masyarakat dan melindungi kepentingan petani dari dampak fluktuasi harga TBS.
2. Peran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai mediator konflik antara petani dan pihak PKS diwujudkan melalui upaya menjembatani komunikasi dan mencari solusi atas perbedaan kepentingan yang muncul dalam penentuan harga TBS. Konflik yang terjadi umumnya berkaitan dengan ketidakpuasan petani terhadap harga yang diterima, perbedaan penilaian terhadap kualitas buah, serta kurangnya pemahaman mengenai faktor-faktor

yang memengaruhi perubahan harga TBS. Dalam kondisi tersebut, pemerintah berperan sebagai pihak yang netral dengan mendengarkan aspirasi kedua belah pihak, memfasilitasi dialog, serta membantu mencari jalan tengah yang dapat diterima bersama. Peran tersebut berkontribusi dalam menjaga hubungan yang harmonis antara petani dan perusahaan serta mencegah konflik berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

3. Pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga TBS didukung oleh adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, petani, pihak PKS, dukungan dari instansi terkait dan keterbukaan informasi mengenai perkembangan harga TBS. Namun, pemerintah juga menghadapi beberapa hambatan, seperti pengaruh harga CPO dan mekanisme pasar global terhadap harga TBS, perubahan kondisi pasar yang sulit diprediksi, perbedaan kepentingan antara petani dan perusahaan, serta keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga secara langsung. Akan tetapi, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan fungsi pengawasan, koordinasi, dan mediasi untuk menjaga stabilitas harga TBS dan melindungi kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat terus meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan petani serta pihak PKS agar stabilitas harga TBS

dapat lebih terjaga dan informasi harga dapat tersampaikan secara transparan kepada masyarakat.

2. Bagi Pihak PKS, diharapkan dapat menjaga komunikasi yang baik dengan petani serta meningkatkan keterbukaan dalam proses penentuan harga TBS guna mengurangi potensi kesalahpahaman dan konflik.
3. Bagi Petani Kelapa Sawit, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil panen dan aktif mencari informasi mengenai perkembangan harga TBS agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berlaku.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji aspek lain yang berkaitan dengan tata niaga kelapa sawit dan perlindungan harga TBS sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfajri, Gayos. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Di Desa Sungai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 6, no. 1 (2024): 94–102. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v6i1.3824>.
- Anisya, Putri Ayu. "Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH)* 3, no. 1 (2024): 94–100.
- Bahri, Usman, Dian Rianita, Zefron, Muharni, and Sulaiman Zuhdi. "Dampak Kebijakan Moratorium Pemberian Izin Baru Di Sektor Perkebunan Terhadap Tata Kelola Lahan Di Provinsi Riau." *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)* 11, no. 2 (2025): 643–53.
- Basuki, Arie. "Melihat Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Terbesar Di Provinsi Aceh." *Merdeka.com*, 2025. <https://www.merdeka.com/peristiwa/foto-melihat-perkebunan-kelapa-sawit-rakyat-terbesar-di-provinsi-aceh-419857-mvk.html>.
- Erna, Safitri, Mursidah, Carbuna, and Aswin Nasution. "Peranan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Nagan Raya." *Dharma Ekonomi* 33, no. 1 (2026): 01–11.
- Febriansyah. "Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjaga Kestabilan Harga Pangan Yang Kian Meningkat." *AL-BAHST Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 35–43.
- Hadi, Fikri, Farina Gandryani, and Fatma Afifah. "Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3, no. 4 (2015): 83–98.
- Haerat, Miftahul, Muhammad Isa Ansari, and Fatmawati. "Peran Pemerintah Dalam Perberdayaan Petani Tanama Porang Di Kabupaten Sinjai." *Journal of Public Policy and Management* 4, no. 1 (2022): 21–27.
- Hamajen, Samsir, Asep Setiawan, and Lusi Andriyani. "Strategi Politik Pemenangan Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba Di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan 2020." *Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 4, no. 1 (2023): 7–20. <https://doi.org/10.24853/independen.4.1.7->.
- Hartono, Budi, and Hadi Jauhari. *Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kebijakan Publik*. Palembang: CV IRDH, 2020.
- Ismaidar, Tamaulina Br Sembiring, and Bonari Tua Silalahi. "Dinamika Politik Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Melalui Jalur Mediasi Di Indonesia." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 144–50.
- Kartini, Mulyati. "Peran Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Penanggulangan

- Kemiskinan: Studi Kasus Di Kabupaten B.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 8 (2025): 3426–34.
- Lubis, Ferry Parotua, Mhd. Asaad, Tri Martial, and Yanti Mariana Eva. “Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Sumatera Utara.” *Junal Muqoddimah: Urnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 9, no. 1 (2015).
- Lubis, Ferry Parotua, Mhd Asaad, Tri Martial, and Mariana Eva Yanti. “Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Sumatera Utara.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 9, no. 1 (2025): 533–38.
- Lubis, R, and Murhayati. “Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Sosial.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025).
- Magdalena, Agnes Xena Phalosa, and Aryo Fadlian. “Masyarakat Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah.” *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021): 71–89.
- Napir, Suaib. “Strategi Pemenangan Fahmi Massiara-Lukman Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Majene.” *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddi* 2, no. 2 (2016): 147–59.
- Nurrisa, A. “Karakteristik Penelitian Kualitatif Dalam Kajian Sosial.” *Karakteristik Penelitian Kualitatif Dalam Kajian Sosial* 3, no. 1 (2025).
- Putriana, Ella, Dewi Kurniati, and Erlinda Yurisinthae. “Struktur, Perilaku Dan Kinerja Pada Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.” *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal Of Indonesian Agribusiness)* 11, no. 1 (2023): 75–86.
- Raya, Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan. “Harga TBS Sawit Nagan Raya Periode 21 April 2025: Mayoritas PMKS Catat Kenaikan Harga Pembelian.” Nagan Raya DisbunNews, 2025. <https://disbun.naganrayakab.go.id/berita/kategori/berita-terkini/harga-tbs-sawit-nagan-raya-periode-21-april-2025-mayoritas-pmks-catat-kenaikan-harga-pembelian>.
- Raya, Pemerintah Kabupaten Nagan. “Gambaran Umum Kabupaten.” Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2026. <https://www.naganrayakab.go.id/halaman/gambaran-umum-kabupaten>.
- Raya, Pemerintah Kabupaten Nagan “Kondisi Geografis.” Nagan Raya Mandiri dan Madani, 2026. <https://naganrayakab.go.id/halaman/kondisi-geografis>.
- Rusdiyanta, Rudi Subiyakto, and Bambang Pujiyono. *Kebijakan Publik Aktor, Model Dan Proses*. Yogyakarta: CV. Graha Ilmu dengan, 2022.
- Sartika, Yuni, Heffi Christya Rahayu, and Seprini. “Analisis Fluktuasi Harga Tanda Buah Segar (TBS) Dan Dampak Lingkungan Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Sawit: Studi Kasus Di Desa Setia Baru.” *Variable:*

Research Journal 02, no. 02 (2025): 534–45.

Sinaga, Ardiansyah, and Randa Putra Kasea Sinaga. “Dampak Ketidakstabilan Harga Kelapa Sawit Bagi Kesejahteraan Petani Di Desa Nagori Bayu Bagasan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.” *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 4, no. 1 (2025): 17–24. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4762>.

Sukowati, Nisa Nurjannah. “Pengaruh Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Terhadap Efek Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia* 2, no. 3 (2022): 282–96. <https://doi.org/10.11594/jesi.02.03.05>.

Taqiyya, N. “Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Fenomena Sosial.” *Jurnal Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2024).

Taufiqurokhman. “Teori Dan Konsep Dasar Kebijakan Publik.” Jakarta, 2023.

Varwasih, Mia Wananda, Indah Kartika Sandra, and Julia Mardalisa M. “Transmisi Asimetris Harga Tandan Buah Segar (TBS) Domestik Dengan Harga Crude Palm Oil (CPO) Pasar Domestik.” *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 11, no. 1 (2025): 1072–82.

Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan.” *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.

Wildayana, Elisa. “Pendekatan Pengendalian Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit.” *Jurnal Habitat* 27, no. 3 (2016): 103–8. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.3.12>.

Zahwa, Salsa Syakila, RM. Rum Hendarmin, and Hamid Halin. “Penerapan Strategi Pengembangan Tergadap Komoditas Sawit Pada Masyarakat Desa Santan Sari Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.” *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 8, no. 11 (2025): 4200–4212.

A R - R A N I R Y

LAMPIRAN

